

KEBIJAKSANAAN PEMBENTUKAN MODAL DAN PENGARUH KREDIT PERBANKAN TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR KOPERASI



No. 1	M. V. HASANUDDIN
No. 2	20-4-92
No. 3	-
No. 4	1 EHP
No. 5	-
No. 6	92 20 04 0641
No. 7	

Oleh :

MUHAMMAD ANSAR

Nomor Mahasiswa : 86 01 158

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1992

**KEBIJAKSANAAN PEMBENTUKAN MODAL
DAN PENGARUH KREDIT PERBANKAN
TERHADAP PENGEMBANGAN
SEKTOR KOPERASI**

S K R I P S I

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi, Jurusan Studi
Pembangunan, Universitas Hasanuddin untuk Memenuhi
Sebagian dari Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

O l e h :

MUHAMMAD ANSAR

Nomor Mahasiswa : 86 01 158

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(DR. H.A. KARIM SALEH)

(DRS. H. SUUDI SA'NA, MS.)

KEBIJAKSANAAN PEMBENTUKAN MODAL
DAN PENGARUH KREDIT PERBANKAN
TERHADAP PENGEMBANGAN
SEKTOR KOPERASI



O l e h

MUHAMMAD ANSAR

Nomor Mahasiswa : 86 01 158

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1992

KEBIJAKSANAAN PEMBENTUKAN MODAL
DAN PENGARUH KREDIT PERBANKAN
TERHADAP PENGEMBANGAN
SEKTOR KOPERASI

S K R I P S I

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi, Jurusan Studi
Pembangunan, Universitas Hasanuddin untuk
Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

O l e h

MUHAMMAD ANSAR

Nomor Mahasiswa : 86 01 158


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



(DR. H.A. KARIM SALEH)

Pembimbing II



(DRS. H. SA'DI SA'NA, MS.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat Rakhmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai mana mestinya, yang merupakan sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Skripsi ini mengemukakan masalah Kebijakan Pelaksanaan Pembentukan Modal dan Pengaruh Kredit Perbankan terhadap Pengembangan Sektor Koperasi. Namun dalam penulisan skripsi ini, kemungkinan untuk terjadi kesalahan masih ada, oleh karena itu maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian dengan segala kekurangan dan kelemahan dan disertai dengan rasa kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini untuk ilmu pengetahuan dan almamater tercinta Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. H.A. KARIM SALEH sebagai Pembimbing I dan sekaligus sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. Bapak DRS. H. SUUDI SA'NA sebagai Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberikan sumbangan fikiran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Sukardi APV., Arifin, SE. dari pihak Bank Bukopin, Arifuddin Ali, SE. dari Bank Indonesia cabang Ujung Pandang, serta Kepala Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan beserta karyawan atas segala bantuan yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Indrasto, BSc. selaku Kakanwil Departemen Koperasi Propinsi Sulawesi Selatan beserta staf yang telah membantu panulis dalam rangka penyediaan data.
6. Teman-teman di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Hasanuddin, teman-teman seperjuangan baik di kampus maupun di Asrama Maspul, di antaranya : Saharuddin, SE., Zakaria Bin Bahari, SE., A. Ahsan Nur, SE., Ir. Muhammad Igbal S., Abd. Fais, A. Pasdar, Musafar, Hag Abu, Eno, Badri, Ir. Sulaiman, dan Naja, SE., serta Ervita yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin.

Dan penghargaan khusus kepada ayahandaku T o a h a dan ibundaku S u b a e d a h yang telah mengasuh dan menem-
pa penulis dalam suka dan duka, serta dengan iringan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada kakak dan adik kandung : Survani Toaha, BSc., Ir. Ramadhan Toaha, Muslimin, Suhartini, dan adik Rahmawati Toaha, penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah memberkati kita semua, amien...!

Ujung Pandang, Maret 1992

P e n u l i s

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Rumusan Masalah	7
1.1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.2. Landasan Teoritik	8
1.2.1. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritik	8
1.3. Hipotesa	13
BAB II. METODOLOGI	
2.1. Kerangka Analisis	14
2.2. Model Analisis	15
2.3. Pembatasan Variabel-Variabel	17
2.4. Rancangan Penelitian	18
2.4.1. Daerah Penelitian	18
2.4.2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	19
2.4.3. Tata Urut Isi Laporan	20
BAB III. BAHASAN TAORI	
3.1. Pembentukan Modal	22

3.1.1.	Pentingnya Pembentukan Modal	24
3.1.2.	Modal Bagi Koperasi	33
3.2.	Kredit Perbankan	37
3.2.1.	Kebutuhan Kredit	38
3.2.2.	Perkreditan Bank/Lumbung Desa, Bank Pasar dan Rumah Gadai	39
3.2.3.	Peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengembangan Koperasi	41
3.2.4.	Berbagai Kebijakan Perbankan untuk Pengembangan Koperasi	44
3.3.	Pengembangan Koperasi	46
3.3.1.	Strategi Pengembangan Koperasi	47
3.3.2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	49
3.4.	Penerapan Ekonomi Mikro dalam Koperasi	52
BAB IV	KEBIJAKSANAAN PEMBENTUKAN MODAL DAN PENGARUH KREDIT PERBANKAN TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR KOPERASI	
4.1.	Gambaran Umum	60
4.1.1.	Modal Simpanan dan Modal Pinjaman ...	60
4.1.2.	Volume Usaha	66
4.1.3.	Sisa Hasil Usaha	69
4.1.4.	Pertumbuhan Koperasi Ditinjau dari Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggota Koperasi	71
4.2.	Pengujian Empiris	76
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	86
5.2.	Saran	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1. Gambaran dari Teori Harrod-Domar 32
- Gambar 3.2. Peranan Koperasi dalam Pengadaan Hasil
Produk dan Pengaruh Terhadap Harga Pasar.. 57

DAFTAR LAMPIRAN

REGRESSION ANALYSIS I	88
REGRESSION ANALYSIS II	89
REGRESSION ANALYSIS III	90
Tabel 4. Jumlah Koperasi, Anggota, Simpanan, Pinjaman, Volume Usaha, SHU, Thn. 1969-1990 di Indonesia	91
Tabel 4.1. Perkembangan Modal Simpanan dan Pinjaman Koperasi di Indonesia tahun 1969 - 1990 ...	92
Tabel 4.2. Perkembangan Volume Usaha dan SHU koperasi di Indonesia Tahun 1969 - 1990	93
Tabel 4.3. Perkembangan Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggota Koperasi di Indonesia th.1969-1990.	94
Tabel 4.4. Komposisi Penduduk Menurut Umur Tahun 1980 - 2000 (dlm. Juta Jiwa)	95

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan pengakuan akan demokrasi ekonomi melalui wadah koperasi, dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :¹

" Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi ".

Dari rumusan yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 ditambah dengan penjelasannya seperti yang tercantum di atas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia hendaknya dibangun di atas landasan tiga sektor ekonomi yakni : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta dan Koperasi, meskipun sebenarnya bangun usaha yang ideal dalam arti paling sesuai dengan asas demokrasi adalah koperasi.

Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tercantum di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong pengembangan koperasi agar dapat berperan lebih besar di

¹ TAP MPR-RI No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Sub Bab : Arah dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi.

berbagai sektor seperti pertanian, perindustrian, konstruksi, perdagangan, keuangan, angkutan, kelistrikan, dan pariwisata. Dalam rangka perwujudan tatanan kehidupan ekonomi yang adil, koperasi perlu diberi kesempatan lebih luas dalam pemilikan usaha-usaha swasta ataupun negara.

Amanat Rakyat melalui wakil-wakilnya dalam MPR tersebut mencerminkan beberapa hal yaitu :

- a. Bahwa konsensus bangsa untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional tetap menjadi suatu cita-cita yang harus diwujudkan
- b. Adanya kesadaran bahwa peranan koperasi masih jauh ketinggalan bila dibanding dengan kedua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta) sehingga perlu ditingkatkan secara terus menerus agar terwujud tatanan ekonomi yang adil.

Meskipun kemauan politik pemerintah terhadap keberadaan koperasi sangat besar, tetapi dalam kenyataannya peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia sangat tertinggal bila dibanding dengan kedua pelaku ekonomi lainnya.

Hal ini diungkapkan oleh Dawam Raharjo sebagai berikut :

" Kedudukan koperasi dalam perekonomian antara lain dapat dilihat dari nilai usahanya. Pada tahun 1979 nilai usahanya mencapai Rp 986,6 milyar, ini kira-kira 3 persen dari PDB. Pada tahun 1982 nilai usaha itu telah jauh meningkat, berkat bantuan pemerintah, menjadi Rp 2,3 trilyun. Dan ini merupakan 3,9 persen dari PDB. Dibanding dengan BUMN yang mewakili negara, peranan koperasi masih kecil karena pada tahun 1979 nilai usaha BUMN meliputi Rp 6,5 trilyun atau sekitar 20,4 persen dari PDB. Pada tahun 1982 peranannya meningkat, mencapai

nilai usaha sebesar Rp 15 trilyun atau sekitar 25,3 % dari PDB. Ini sama dengan kira-kira 6,5 kali nilai usaha koperasi. Padahal satuan usaha koperasi, baik KUD maupun non-KUD, meliputi 12,766 buah, sedangkan jumlah BUMN hanya 220 satuan usaha saja". (2)

Apa yang diungkapkan oleh Dawam Raharjo tersebut di atas juga didukung oleh data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik memperlihatkan bahwa pada tahun 1985 nilai usaha koperasi berjumlah Rp 2,21 trilyun. Bila dibandingkan dengan Produk Nasional Bruto pada tahun 1985 yang berjumlah Rp 95,5 trilyun maka peran koperasi malah turun menjadi 2,34 %.

Meskipun beberapa pakar koperasi meragukan angka-angka tersebut, terutama karena berbeda cara perhitungannya, tetapi mereka sepakat bahwa koperasi masih tertinggal jauh dari dua pelaku ekonomi lainnya. Pertanyaan yang timbul dengan adanya kondisi semacam itu adalah; mengapa koperasi dengan segala kemudahan dan fasilitas yang diperoleh belum mampu berperan dalam sistem ekonomi nasional, dan faktor apa yang menyebabkannya.

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak terlepas dari hakekat keberadaan koperasi. UUD 1945 pasal 33 memuat Koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.³

2 M. Dawam Raharjo, Pola Pengembangan Industri Kecil Melalui Koperasi, (Ke arah Pemahaman Bangun Usaha Koperasi), Balitbang Depkop, Jakarta, 1985, hal. 211

3 Undang-undang tentang Pokok-Pokok Perkoperasian No. 12 tahun 1967, Departemen Koperasi, Jakarta, 1987

Sebagai organisasi, organisasi ekonomi yang berwatak sosial, koperasi adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Hal ini berarti bahwa koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan, mengusahakan kebutuhan serta kepentingan anggotanya dalam rangka mempertinggi martabat dan tingkat kesejahteraan mereka. Selanjutnya karena bentuk usahanya didasarkan atas keinginan anggotanya. Suara anggota adalah kekuasaan tertinggi, dan setiap anggota mempunyai hak suara yang sama.

Landasan ideal filosofis sebagaimana tersebut di atas menunjukkan perbedaan yang khas antara koperasi dengan badan usaha lainnya. Namun ciri khas ini pulalah yang menyebabkan timbulnya perbedaan persepsi tentang koperasi dengan adanya penafsiran yang berbeda-beda tentang hakikat tujuan atau saaran koperasi. Dari definisi koperasi sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi mempunyai tujuan yang berdimensi ganda, yakni :

- a. Sebagai badan usaha ekonomi ; dalam posisi ini koperasi dituntut untuk melakukan kegiatan yang ekonomis rasional sehingga mampu menghasilkan keuntungan
- b. Sebagai organisasi yang memiliki watak sosial ; dalam hal ini koperasi dituntut untuk berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan anggotanya dalam melaksanakan kegiatan anggotanya. Dengan demikian apabila

efektivitas tujuan koperasi akan diukur, maka kriterianya tidak hanya segi ekonomi saja, tetapi juga bagaimana koperasi memberikan pelayanan non-ekonomis termasuk pendayagunaan manusia-manusia yang terlibat di dalamnya.

Tujuan ganda ini menyebabkan para pengelola yang menekankan pada aspek ekonomis mungkin akan mendahulukan usaha pencapaian keuntungan (Sisa Hasil Usaha) agar dapat melayani keperluan anggotanya. Demikian juga sebaliknya, pengelola yang lebih menekankan aspek sosial, mungkin akan mendahulukan pelayanan kepada anggota, dan apabila pelayanan tersebut diperoleh laba usaha maka laba usaha tersebut digunakan untuk mengembangkan organisasi agar dapat lebih banyak melayani kepentingan anggota.

Situasi tersebut di atas yakni kesulitan menentukan strategi dasar yang tepat dalam pengelolaan koperasi, merupakan salah satu penyebab belum berhasilnya misi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Faktor-faktor lainnya mengakibatkan permasalahan koperasi bertambah kompleks, di antaranya adalah : Kelemahan manajemen, baik yang berkaitan dengan mekanisme kerja maupun profesionalisme; sikap mental pengelola; pengawasan dan pengendalian yang lemah; hambatan lingkungan; dan yang lebih penting adalah kurangnya kemampuan koperasi dalam hal pemupukan modal anggota maupun yang berasal dari luar, khususnya dari pihak perbankan.

Kendatipun koperasi telah diberi peluang untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah bila kondisi modal yang akan dipergunakan untuk pengembangan usaha koperasi tidak mencukupi maka koperasi terasa sulit untuk mencapai apa yang diharapkan, terlebih lagi untuk sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Hal ini merupakan permasalahan yang cukup berarti dan sampai saat ini masih terus diperdebatkan.

Kepercayaan terhadap asas yang telah dianut koperasi bukan barang baru dalam kepustakaan koperasi, sebab atas dasar itulah berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbesar sumbangan anggota dalam permodalan koperasi, tetapi sayangnya langkah tersebut belum berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Akibatnya tidak sedikit kalangan yang meragukan tentang konsep ini, terutama dalam upaya memberikan efek percepatan guna mengejar para konglomerat yang telah berada jauh di depan.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah usaha mobilisasi dana anggota mustahil dilakukan ?, di mana letak kesalahan mekanisme pengerahan dana anggota selama ini ?, ataukah anggota tidak melihat adanya rangsangan untuk memperbesar sumbangan dalam koperasi ?. Dan untuk keluar dari permasalahan tersebut di atas, apakah koperasi telah memanfaatkan peluang penggunaan kredit perbankan dalam pengembangan usahanya, seberapa besar pengaruh modal luar yang telah digunakan oleh koperasi untuk memperbesar volume usahanya

serta seberapa besar modal simpanan yang telah dipergunakan dalam hal peningkatan volume usaha koperasi.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sampai sejauh mana pengaruh mobilisasi modal sendiri (simpanan) serta modal pinjaman terhadap besarnya volume usaha koperasi serta terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi di Indonesia selama kurun waktu observasi (1969 - 1990), dengan judul : "Kebijaksanaan Pembentukan Modal dan Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pengembangan Sektor Koperasi".

1.1.1. Rumusan Masalah

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka penulis akan mengangkat permasalahan yang akan dibahas selanjutnya, yaitu sampai sejauh mana pengaruh modal sendiri (simpanan anggota yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela) dan modal pinjaman (kredit) perbankan terhadap pengembangan koperasi di Indonesia selama kurun waktu 1969 - 1990. Yang mana indikator perkembangan koperasi di sini adalah volume usaha dan Sisa Hasil Usaha.

1.1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana usaha koperasi dapat berkembang dengan didukung oleh mobilisasi dana dari para anggota dan sejauh mana pengaruh modal utang atau pinjaman dari perbankan untuk pengembangan usaha koperasi.

Kegunaan dari penelitian ini bila tujuan di atas ter-

capai yaitu memberi gambaran tentang perkembangan koperasi selama masa observasi serta bagaimana cara yang ditempuh untuk mengembangkan koperasi di masa-masa mendatang. Selain itu dapat pula memberikan gambaran tentang hubungan modal simpanan dan modal hutang terhadap volume usaha serta Sisa Hasil Usaha koperasi. Dengan mengetahui sejauh mana pengaruh modal simpanan maupun modal pinjaman tersebut terhadap peningkatan volume usaha dan Sisa Hasil Usaha maka dapat diambil suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembentukan modal bagi koperasi.

1.2. Landasan Teoritik

1.2.1. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritik

Dengan semakin berkembangnya perekonomian dunia yang ditandai dengan globalisasi kegiatan ekonomi, dengan sendirinya diperlukan adanya keterkaitan antara semua sektor untuk memacu kegiatan pembangunan. Setiap gerak langkah yang dilakukan oleh sektor pemerintah, swasta dan koperasi memerlukan dukungan modal yang memadai.

Dalam dekade terakhir ini makin disadari bahwa tersedianya modal belumlah cukup sebagai syarat untuk menciptakan pembangunan. Mula-mula banyak kalangan yang berpendapat bahwa modal berperan sangat penting dan paling menentukan dalam penciptaan pembangunan ekonomi. Sekarang ini telah disadari oleh berbagai kalangan bahwa beberapa faktor lain; seperti tersedianya tenaga ahli dalam berbagai bidang, terdapatnya tenaga usahawan yang cukup, kemudian segi besar-

nya kemampuan dalam penciptaan dan penggunaan teknologi yang lebih modern, serta corak sikap masyarakat memegang peranan yang tidak kalah pentingnya di dalam penciptaan pembangunan ekonomi.

Ada juga kalangan yang menganggap modal sebagai suatu yang menduduki tempat yang istimewa dalam pembangunan, keyakinan ini didasarkan pada kesanggupan modal untuk menciptakan faktor-faktor lain yang penting artinya dalam pembangunan diantaranya adalah administrasi pemerintah yang efisien, modernisasi sektor industri, dan pengembangan sektor pertanian, pengembangan maupun perbaikan berbagai jenis prasarana, dan sebagainya. Kesemuanya ini memerlukan tersedianya modal yang cukup.

Berdasarkan pada sumber modal yang dapat digunakan untuk pembangunan, bagi sektor koperasi dapat dibagi dalam dua sumber utama yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Sedang bagi sektor pemerintah, modal ini bersumber dari pengarah modal dalam negeri dan pengarah modal luar negeri. Modal yang berasal dari dalam negeri didapatkan melalui tiga cara yaitu tabungan sukarela dari masyarakat, tabungan pemerintah dan tabungan paksa. Hampir semua negara berkembang merasakan bahwa tabungan sukarela dan tabungan pemerintah adalah kurang cukup untuk membiayai pembangunan. Jika modal dalam negeri dianggap belum cukup maka modal lain diperoleh dari luar negeri. Demikian pula halnya dengan sektor koperasi yang harus mencari modal dari luar untuk meng-

imbangi kekurangan modal yang bersumber dari simpanan anggota. Modal dari luar yang dimaksud adalah modal yang bersumber dari pinjaman (kredit perbankan).

Di lain pihak, pakar ekonomi terkemuka, Adam Smith mengemukakan tentang pentingnya modal dalam suatu proses pertumbuhan ekonomi. Menurut beliau bahwa pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja, meskipun pembagian kerja bagi Adam Smith adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakannya.

Sama halnya dengan ahli ekonomi modern, Adam Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak pembangunan ekonomi. Dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan untuk lebih banyak menanam modal.

Dalam dunia usaha, pendirian sudah ditentukan yang mana modalnya dibentuk atas kesepakatan pendiri perusahaan tersebut yang tercantum dari besarnya nilai saham. Pemegang saham yang terbesar tentu akan lebih banyak berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan tersebut. Ini dapat dilihat ketika diadakan rapat umum pemegang saham. Lain halnya dengan sektor koperasi yang mana setiap orang mempunyai hak suara, jadi tidak tergantung dari besarnya modal yang dimiliki dalam koperasi. Selain itu cara perolehan modal telah diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang telah disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), di dalam rapat ini disepakati

adanya simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Pengalaman dari tahun ke tahun di mana kecilnya modal yang diperoleh dari partisipasi anggota tersebut sehingga koperasi sangat lambat berkembang dibanding dengan dua pelaku ekonomi lainnya. Untuk keluar dari permasalahan tersebut, dan untuk mengikuti alur bisnis yang semakin kompetitif maka atas kebijaksanaan pengurus koperasi mulai melirik perbankan sebagai alternatif pemenuhan modal untuk pengembangan usaha. Kendatipun hal ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, namun akan terjadi proses ketergantungan koperasi terhadap perbankan yang terus meningkat yang pada akhirnya akan memperbesar utang. Implikasi dari bertambahnya utang tersebut adalah bertambahnya modal koperasi sehingga dapat menambah kekuatan koperasi dalam mencapai sasaran.

✓ Jadi dengan adanya modal dari pihak perbankan yang diperuntukkan bagi koperasi maka koperasi akan semakin kuat karena disamping sudah didukung oleh modal yang bersumber dari para anggota yang sudah merupakan keharusan, juga sudah memanfaatkan jasa perbankan yang semakin membuat koperasi pada suatu saat mempunyai kemungkinan yang lebih baik untuk berkembang dibanding dengan pelaku ekonomi lainnya, dengan catatan harus membenahi sistem manajemen ke arah yang lebih baik.

Di sisi lain seorang pakar perkoperasian di Indonesia mengemukakan bahwa :


" Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama melalui pembentukan organisasi yang dikendalikan secara dramatis memberikan sumbangan yang adil terhadap modal yang diperlukan dan menerima resiko-resiko dan kemanfaatan usaha koperasi di mana para anggotanya ikut ambil bagian ". (5)

Pendapat tersebut di atas dikemukakan oleh Ibnu Sudjana, yang mengandung makna bahwa koperasi mempunyai anggota yang harus dengan sukarela menyumbang koperasinya baik berupa tenaga ataupun modal demi pengembangan koperasi tersebut. Jadi apabila setiap anggota telah menyadari tentang keberadaan koperasi itu sendiri dan ditambah lagi oleh adanya bantuan modal dari pihak perbankan maka dapat dibayangkan betapa laju perkembangan koperasi seandainya hal ini dapat terlaksana.

✓ Jadi jelas di sini bahwa pemupukan modal merupakan unsur penting di dalam pembangunan ekonomi umumnya dan pembangunan koperasi pada khususnya. Hal ini telah didukung pula oleh berbagai ahli yang mengemukakan pentingnya peranan modal, di antaranya Thomas Robert Malthus yang menyebutkan bahwa akumulasi modal merupakan faktor penting bagi pembangunan ekonomi.

John Stuart Mill juga mengemukakan hal yang sama, dalam hal ini beliau mengemukakan bahwa laju akumulasi modal tergantung pada jumlah dana yang dapat menghasilkan tabungan dan kuatnya kecenderungan untuk menabung.

5 Ibnu Sudjana, Koperasi sebagai alat kebijaksanaan pemerintah dan perkembangannya, LP3S (ed. Juli 1986)



1.3. Hipotesa

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, dan dengan melihat tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini maka hipotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Diduga bahwa besarnya modal sendiri yang bersumber dari partisipasi anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela mempunyai peranan penting terhadap peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi
2. Diduga pula bahwa modal utang yang diperoleh dari dukungan perbankan diharapkan akan menambah Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi
3. Dan diduga bahwa besarnya modal baik yang bersumber dari simpanan anggota maupun yang bersumber dari pinjaman melalui pihak perbankan akan menambah besarnya volume usaha koperasi.

B A B II

M E T O D O L O G I

2.1. Kerangka Analisis

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya telah dikemukakan tentang pengembangan koperasi yang diukur dengan besarnya volume usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai dua di antara sekian indikatornya, memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan berkembangnya modal usaha baik yang bersementer dari simpanan anggota, maupun yang bersumber dari pinjaman yang diberikan oleh pihak perbankan.

Dalam pembahasan kali ini akan diuraikan tentang perkembangan koperasi yang dalam hal ini diwakili oleh perkembangan jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, jumlah modal (simpanan anggota dan kredit perbankan), perkembangan volume usaha, Sisa Hasil Usaha, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terkait dengan itu. Pembahasan ini mencakup periode 1969 - 1990.

Langkah berikutnya adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh modal simpanan dan modal pinjaman sebagai variabel independen terhadap besarnya volume usaha koperasi di Indonesia selama masa observasi (1969 - 1990). Kemudian penulis mencoba juga melihat pengaruh volume usaha terhadap Sisa Hasil Usaha selama masa observasi, dan yang terakhir adalah upaya untuk melihat hubungan antara modal

simpanan dan modal pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha. Dari hasil regresi yang dihasilkan maka dapat diketahui seberapa besar pengaruh modal yang bersumber dari simpanan maupun pinjaman terhadap peningkatan volume usaha, atau terhadap Sisa Hasil Usaha. Dengan mengetahui besarnya pengaruh tersebut maka akan lebih memudahkan bagi pihak-pihak yang berkompeten untuk mengambil kebijaksanaan guna memacu perkembangan koperasi di Indonesia.

2.2. Model Analisis

Untuk memudahkan analisis dalam penulisan ini maka penulis menggunakan peralatan model ekonometrik yaitu regresi berganda dan regresi linier sebagai berikut :

Regresi I :

$$\ln(Y) = b_0 + b_1 \ln(X_1) + b_2 \ln(X_2) + u$$

di mana :

Y = Volume Usaha koperasi

X_1 = Modal pinjaman (kredit)

X_2 = Modal simpanan (simpanan anggota)

b_1, b_2 = parameter

b_0 = konstanta

u = Error terms

ln = Logaritma natural

Regresi I tersebut di atas untuk melihat hubungan antara modal pinjaman dan modal simpanan terhadap volume usaha.

Regresi II berikut ini untuk melihat hubungan antara volume usaha terhadap Sisa Hasil Usaha sbb. :

Regresi II :

$$\ln (Z) = c_0 + c_1 \ln (Z) + u$$

di mana :

Z = Sisa Hasil Usaha (SHU)

Y = Volume Usaha

c_1 = parameter

c_0 = konstanta

u = Error terms

ln = logaritma natural

Regresi III berikut ini untuk melihat hubungan antara modal pinjaman dan modal simpanan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) :

Regresi III :

$$\ln (Z) = d_0 + d_1 \ln (X_1) + d_2 \ln (X_2) + u$$

di mana :

Z = Sisa Hasil Usaha (SHU)

X_1 = Modal pinjaman (kredit)

X_2 = Modal simpanan (simpanan anggota)

d_1, d_2 = parameter

d_0 = konstanta

u = Error terms

ln = logaritma natural

Analisa kuantitatif ini juga ditunjang oleh hasil pengujian dari perhitungan-perhitungan statistik yang

harus dipenuhi antara lain R^2 , Standard Error of Regression (SER), t_{test} , (t), F_{test} , (F), dan Durban Watson Ratio (DWR).

2.3. Pembatasan Variabel-Variabel

- a. Sisa Hasil Usaha (SHU); yang dimaksud dengan SHU di sini adalah jumlah seluruh penghasilan koperasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional koperasi. SHU ini identik dengan keuntungan bersih yang didapat dari seluruh penghasilan koperasi. Dari keseluruhan keuntungan ini tidak semua keuntungan bersihnya jatuh ke dalam kas koperasi karena dari keuntungan bersih ini masih harus dibagi-bagi lagi, di mana diantaranya adalah pembagian keuntungan untuk seluruh anggota, dana pendidikan, perluasan daerah kerja, dan setelah itu barulah kira-kira beberapa bagian digunakan sebagai cadangan untuk modal koperasi selanjutnya atau sebagai akumulasi modal.
- b. Volume Usaha; yang dimaksud dengan volume usaha di dalam pembahasan ini adalah jumlah seluruh nilai usaha yang dimiliki oleh koperasi di seluruh Indonesia.
- c. Modal pinjaman; pengertian modal pinjaman adalah jumlah seluruh modal yang didapatkan di luar sektor koperasi, yang pada umumnya diperoleh dari pihak perbankan, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Dalam pemberian pinjaman ini biasanya bank pemerintah memberikan syarat-syarat yang lebih ringan dibanding bank swasta.

d. Modal Simpanan; modal ini didapatkan koperasi dari para anggota melalui simpanan, baik yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib atau simpanan sukarela. Simpanan pokok adalah simpanan yang diharuskan bagi anggota yang baru masuk, dan besarnya sama bagi setiap anggota. Simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan bagi setiap anggota jumlah minimumnya, sedang jumlah maksimumnya tidak dibatasi, dan ini biasanya dibayarkan pada waktu-waktu tertentu. Sedang yang dimaksud dengan simpanan sukarela adalah simpanan yang mana jumlah dan waktunya tidak ditentukan dengan pasti.

2.4. Rancangan Penelitian

2.4.1. Daerah Penelitian

Sehubungan dengan penulisan ini maka penulis mengadakan penelitian di berbagai tempat untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Karena masalah yang dibahas adalah masalah koperasi maka penulis memfokuskan penelitian pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Bank Bukopin, Bank Indonesia cabang Ujung Pandang, serta pada Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, selain itu juga di berbagai instansi terkait. Selain itu juga diadakan penelitian di berbagai perpustakaan yang bisa menyediakan literatur-literatur berguna untuk menunjang penulisan ini, di antaranya Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Wilayah, dan tempat-tempat lain yang bisa memberikan data untuk menunjang penulisan ini.

2.4.2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pertama-tama penulis mengumpulkan data yang terdiri dari data sekunder, kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian diadakan pengelompokan dan identifikasi, lalu diadakan pengolahan dengan bantuan peralatan komputer dengan program microstat untuk menghindari kekeliruan-kekeliruan dalam perhitungan dan untuk memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Data yang penulis kumpulkan meliputi data tentang jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, besarnya modal simpanan, besarnya modal pinjaman, besarnya volume usaha, serta besarnya Sisa Hasil Usaha. Di samping itu penulis juga mengambil data tentang komposisi penduduk menurut umur sebagai bahan perbandingan.

Langkah selanjutnya yang penulis tempuh adalah menentukan model pengujian statistik yang akan dipakai, model pengujian tersebut meliputi : Uji statistik-t, yaitu bertujuan untuk menentukan signifikansi antara variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Dalam hal ini apabila nilai t-hitung ternyata lebih besar daripada nilai t-tabel maka disimpulkan bahwa variabel tersebut mempunyai keberartian secara statistik. atau signifikan, demikian pula sebaliknya kalau t-hitung lebih kecil daripada t-tabel, maka disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak punya keberartian secara statistik atau tidak signifikan. Pengujian yang lain yaitu pengujian tingkat signifikansi antara variabel independen secara bersama-sama terhadap Variabel dependen.

Setelah pengujian-pengujian sudah dilakukan maka langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan-kesimpulan dari pengolahan dan pengujian-pengujian yang telah dilakukan. Dalam hal ini kita telah dapat menyatakan apakah hipotesa yang telah kita angkat sebelumnya terbukti atau tidak.

2.4.3. Tata Urut Isi Laporan

Sebagai salah satu syarat dalam penulisan karya ilmiah, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar urutan pembahasan mudah diikuti dengan saksama, di samping memudahkan penafsiran dalam analisis. Adapun sistematika yang dimaksud adalah :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang berupa pertimbangan obyektif dan subyektif, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian; landasan teoritik yang terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka teoritik; serta yang terakhir adalah hipotesa.

Bab kedua, merupakan bab metodologi yang berisikan kerangka analisis, model analisis, pembatasan variabel-variabel, serta rancangan penelitian yang terdiri dari daerah penelitian, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan tata urut isi laporan.

Bab ketiga, merupakan bab teori yang membahas tentang pembentukan modal yang meliputi pentingnya pembentukan modal, modal bagi koperasi; kredit perbankan yang meliputi kebutuhan kredit, perkreditan bank/lumbung desa, bank pasar dan rumah gadai, peranan bank perkreditan rakyat dalam pengembangan koperasi, berbagi kebijaksanaan perbankan-

an untuk pengembangan koperasi; pengembangan koperasi yang meliputi strategi pengembangan koperasi, program pembinaan dan pengembangan koperasi; penerapan ekonomi mikro dalam koperasi.

Bab keempat, merupakan bab pembahasan secara empiris yang meliputi gambaran umum, pengujian empiris tentang pengaruh modal pinjaman dan modal simpanan terhadap besarnya volume usaha, pengaruh volume usaha terhadap besarnya sisa hasil usaha, pengaruh modal pinjaman dan modal simpanan terhadap besarnya sisa hasil usaha koperasi di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab kesimpulan dan saran yang mengemukakan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan secara empiris dan memberikan beberapa saran yang berguna bagi upaya pengembangan koperasi di Indonesia.

B A B III
BAHASAN TEORI

3.1. Pembentukan Modal

Pembentukan modal atau biasa juga disebut akumulasi modal (capital accumulation) adalah suatu peningkatan stok/persediaan modal. Sedang persediaan modal itu sendiri adalah jumlah persediaan barang-barang fisik yang ada pada suatu periode waktu tertentu dan digunakan untuk memproduksi barang-barang lainnya termasuk jasa.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan modal adalah pembayaran yang diinvestasikan untuk keperluan produksi dan pendapatan di masa-masa mendatang. Selain dari itu ada juga pengertian modal yang lain yaitu jumlah uang atau barang yang diinvestasikan untuk memproduksi barang atau jasa-jasa ekonomi, baik yang bentuknya sekali pakai maupun yang dapat digunakan secara berulang-ulang.

Modal atau kapital sebagai faktor produksi, jika dilihat dari asalnya yaitu berasal dari alat penghasil yang dihasilkan oleh pekerjaan manusia dengan alam yang berwujud pabrik, mesin-mesin, gedung dan bahan-bahan lainnya serta kredit bank.

Di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, masalah permodalan masih merupakan masalah yang sangat esensial sampai pada saat sekarang ini. Pada umumnya

6 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, 1987, hal. 235

masalah kekurangan modal dapat ditinjau dari dua aspek yaitu kekurangan dalam alat-alat modal yang terdapat di dalam masyarakat dan kekurangan dana modal untuk membiayai dana modal demi pembentukan modal baru. Terbatasnya alat-alat modal dapat dilihat dari terbatasnya jumlah prasarana dan terbatasnya alat-alat modal yang modern yang dapat dipergunakan dalam memproduksi. Keadaan ini dapat menimbulkan implikasi yang sangat serius dalam perekonomian, yaitu terbatasnya alat-alat modal yang modern yang dapat dipergunakan oleh masyarakat mengakibatkan sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat produktivitasnya sangat rendah, dan organisasi produksinya sangat tidak efisien. Selanjutnya hal tersebut merupakan faktor penting lain yang menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah di negara-negara berkembang.

Kekurangan modal dapat pula dilihat dari kurangnya dana modal untuk membiayai pembentukan modal yang baru yang harus dilakukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan kenaikan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan modal tersebut bukan saja dilakukan oleh para pengusaha swasta atau koperasi tetapi juga oleh pemerintah, karena dalam pembangunan, pembentukan modal sosial yaitu pembentukan berbagai prasarana, dan pembentukan modal dalam kegiatan-kegiatan yang langsung menghasilkan keperluan masyarakat, perlu dilaksanakan secara bersama-sama. Pembentukan modal sosial pada umumnya dilakukan

oleh pihak pemerintah dan pembentukan modal di sektor produktif pada umumnya dilakukan pihak-pihak di luar pemerintah seperti swasta dan koperasi.

3.1.1. Pentingnya Pembentukan Modal

Beberapa ahli telah mengemukakan betapa pentingnya pembentukan modal demi kelancaran pembangunan melalui suatu proses yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat atau badan usaha. Menurut Schumpeter bahwa penanaman modal dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pembentukan/penanaman modal otonomi (autonomous investment) dan penanaman modal terpengaruh (induced investment). Penanaman modal otonomi ditentukan oleh perkembangan dalam jangka panjang, terutama dalam penemuan kekayaan alam yang baru dan teknologi. Berarti penanaman modal otonomi adalah penanaman modal untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan. Sedangkan penanaman modal terpengaruh adalah penanaman modal yang dilakukan sebagai akibat dari adanya kenaikan dalam produksi, pendapatan, penjualan atau keuntungan perusahaan-perusahaan. Dari kedua jenis penanaman modal tersebut, penanaman modal terpengaruh adalah yang paling besar jumlahnya.⁷

Selanjutnya Schumpeter mengemukakan bahwa apabila kemajuan ekonomi telah tercapai maka akan terjadi perubahan dalam masyarakat yang akan menghapuskan peranan pengusaha,

7 Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, LPFE-UI, Jakarta, 1985, hal. 283

Mereka bukan lagi golongan-golongan masyarakat yang menciptakan pembaharuan-pembaharuan di dalam masyarakat atau perekonomian. Perubahan-perubahan tersebut di atas digolongkan ke dalam tiga golongan terpenting, di antaranya: (1) Perkembangan ekonomi akan mengakibatkan kegiatan pembaharuan dan pengembangan teknologi akan menjadi peristiwa yang rutin. Tugas mengembangkan hal-hal tersebut akan dilakukan oleh orang-orang yang khusus ditugaskan untuk melakukan hal-hal tersebut, yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan. Dengan demikian kegiatan pembaharuan sekarang adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dipimpin oleh pimpinan perusahaan yang sangat terdidik. (2) Pembangunan ekonomi akan menghancurkan rangka dasar sistem institusionil dan kapitalisme, yaitu modernisasi akan menciptakan perusahaan-perusahaan raksasa yang dipimpin oleh pimpinan perusahaan yang profesional. Mereka ini kebanyakan mempunyai sikap sebagai pegawai dan bukan sebagai pengusaha yang inovatif. Sedangkan para pemilik saham, yang merupakan pemilik perusahaan, sangat terpisah dari kegiatan sehari-hari perusahaan dan dengan demikian maka mereka tidak menyumbangkan pemikiran untuk mengembangkan perusahaan tersebut. (3) Pembangunan ekonomi akan mengakibatkan sistem politik dan pemerintahan yang menjadi dasar dari sistem kapitalisme - yaitu sistem kerajaan dan tuan tanah - mengalami kehancuran dan digantikan oleh sistem pemerintahan dan politik yang di-

kuasai oleh pemilik modal, industrialis dan pedagang yang pada akhirnya menimbulkan keadaan yang berbeda-bada dari sebelumnya.⁸

Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus,⁹ bahwa penanaman modal atau investasi sekarang ini sebagian besar dilakukan oleh kalangan dunia usaha, terutama perusahaan-perusahaan. Apabila perusahaan melihat adanya peluang penanaman modal yang menguntungkan maka pemiliknya akan menanam kembali sebahagian keuntungannya kedalam perusahaannya sendiri. Dengan demikian, sampai suatu kadar tertentu tabungan perusahaan masih dilandasi oleh keinginan perusahaan untuk investasi. Namun bila peningkatan tajam dalam investasi perusahaan terjadi maka seluruh investasi ini dibiayai oleh sumber dana dari luar seperti saham, pinjaman, atau kredit bank.

Lain halnya dengan Harrod-Lomar yang membahas secara gamblang tentang peranan pembentukan modal dalam mencapai suatu pertumbuhan atau pengembangan yang mantap. Teori ini pada hakekatnya menganalisa mengenai persoalan berikut: Sarat-syarat apakah atau keadaan yang bagaimanakah yang harus tercipta dalam perekonomian yang ada untuk menjamin agar dari masa ke masa kesanggupan memproduksi selalu bertambah akibat dari penanaman modal akan selalu sepenuhnya

8 Sadono Sukirno, op.,cit., hal. 284 -285

9 Paul A. Samuelson & William Nordhaus, Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1989, hal. 131



digunakan ? Dengan demikian teori Harrod-Domar pada hakekatnya berusaha menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau steady growth - yang dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang selalu akan menggunakan alat-alat modal, secara sepenuhnya - akan selalu berlaku dalam perekonomian. Hal ini berbeda dengan pendapat kaum Klasik dan Keynes yang hanya membahas dari satu sisi saja tentang pembentukan modal. Menurut kaum klasik bahwa pembentukan modal merupakan suatu pengeluaran yang akan menambah kesanggupan masyarakat untuk menambah produksi. Bagi kaum Klasik, pembentukan modal merupakan suatu pengeluaran yang akan mempertinggi jumlah alat-alat modal dalam masyarakat. Kaum Klasik tidak mempertimbangkan fungsi pembentukan modal dalam masyarakat sebagai usaha untuk mempertinggi pengeluaran masyarakat.

Sedangkan pandangan Keynes mengabaikan sama sekali tentang peranan pembentukan modal sebagai usaha untuk memperbesar kesanggupan sektor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan masyarakat. Bahkan Keynes sendiri lebih menekankan analisisnya pada masalah kekurangan pengeluaran masyarakat karena ia menganggap bahwa tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh tingkat pengeluaran masyarakat dan bukan oleh kesanggupan alat-alat modal untuk memproduksi barang-barang.¹⁰

Dalam analisis Harrod-Domar menjelaskan tentang ke-

10 Sadono Sukirno, op., cit., hal. 287

sanggupan pembentukan modal untuk menambah kesanggupan perekonomian demi menghasilkan barang-barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah pengeluaran atau permintaan efektif seluruh masyarakat. Teori tersebut menunjukkan suatu kenyataan yang menunjukkan bahwa Keynes mengabaikan hal tersebut, yaitu apabila suatu masa tertentu dilakukan pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian menunjukkan kesanggupan yang lebih besar untuk menghasilkan barang-barang. Selanjutnya Harrod-Domar menggunakan premis sebagai berikut : (1) Pada tarap permulaan perekonomian mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan alat-alat modal yang tersedia dalam masyarakat sepenuhnya digunakan; (2) perekonomian tersebut terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak terdapat; (3) besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan masyarakat, dan keadaan ini berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol; (4) kecenderungan menabung batas besarnya tetap, dan begitu juga perbandingan di antara jumlah modal dengan jumlah produksi yang lebih lazim disebut rasio modal produksi (capital output ratio) - dan perbandingan di antara penambahan modal dengan jumlah, penambahan produksi - yang lazim disebut sebagai rasio penambahan modal produksi (incremental capital output ratio) - besarnya tidak berubah.

Untuk memperjelas konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas maka Harrod-Domar menggunakan pendekatan mate-

matik. Menurutnya bahwa penanaman modal yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu waktu tertentu digunakan untuk dua tujuan yaitu untuk mengganti alat-alat modal yang tidak dapat digunakan lagi dan untuk memperbesar alat-alat modal yang tersedia di masyarakat. Menurutnya, bahwa dalam memperbandingkan jumlah pertambahan produksi dengan penanaman modal yang dilakukan, akan diperoleh dua macam nilai yaitu:¹¹

1. Perbandingan di antara seluruh tambahan produksi yang diciptakan dalam satu tahun tertentu oleh sejumlah penanaman modal, dengan jumlah modal yang ditanamkan tersebut tanpa memperhitungkan penyusutan.
2. Perbandingan di antara jumlah pertambahan produksi dengan penanaman modal yang dilakukan dengan memperhitungkan penyusutan.

Nilai yang diperoleh bila tidak ada penyusutan, misalnya pada satu tahun tertentu penanaman modal yang dilakukan adalah Rp 1 milyar akan menghasilkan produksi sebesar Rp 300 juta setiap tahun, maka perbandingan di antara jumlah produksi tambahan dengan jumlah modal yang ditanamkan adalah sebesar $\text{Rp } 300 \text{ juta} / \text{Rp } 1 \text{ milyar} = 0,3$.

Dan apabila ada penyusutan misalnya sebagai akibat dari penyusutan alat-alat modal yang lama, alat-alat modal yang tersisa hanya sanggup menghasilkan sebanyak Rp 50 juta lebih rendah dari kalau dianggap tidak ada penyusutan.

¹¹ Sadono Sukirno, op. cit., hal. 288

Maka dengan adanya penanaman modal Rp 1 milyar, yang sanggup menghasilkan produksi sebesar Rp 300 juta, perekonomian tersebut hanya sanggup menaikkan produksi sebesar Rp 250 juta. Maka perbandingan antara jumlah produksi dengan jumlah modal yang ditanamkan adalah Rp 250 juta dibagi dengan Rp 1 milyar yang menghasilkan 0,25 yang disebut sebagai rasio produksi modal, yang merupakan kebalikan dari rasio modal produksi (capital output ratio), nilai inilah yang dianggap penting bagi Harrod-Domar karena nilai tersebut menunjukkan pertambahan efektif memproduksi suatu negara yang ditimbulkan oleh penanaman modal baru yang dilakukan dalam satu tahun tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas maka pertambahan efektif dari kapasitas alat-alat modal yaitu setelah dikurangi dengan penyusutan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta Y_s = \sigma \cdot I$$

di mana:

ΔY_s = pertambahan kapasitas yang efektif dari alat-alat modal yang baru

I = besarnya pembentukan modal yang dibutuhkan

σ = rasio produksi modal atau sering disebut sebagai produktivitas modal.

Yang perlu diingat di sini adalah bahwa pertambahan kesanggupan alat-alat modal untuk menghasilkan barang-barang tidak secara otomatis tercipta atau tidak secara otomatis menciptakan pertambahan produksi dan kenaikan pendapatan. Untuk menaikkan kesanggupan menaikkan pendapatan,

uan menciptakan pembangunan ekonomi maka haruslah keseluruhan permintaan masyarakat bertambah. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam ekonomi dua sektor, pertambahan pendapatan nasional hanyalah tercipta dari pertambahan penanaman modal. Jadi ringkasnya bahwa peranan modal dalam peningkatan produksi sangatlah penting.

Kemudian untuk melihat sampai di mana pertambahan penanaman modal akan menciptakan pertambahan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:¹²

$$\Delta Y_d = \frac{1}{1-\alpha} \cdot \Delta I$$

di mana:

ΔY_d = pertambahan dalam pendapatan nasional

α = kecondongan menabung batas

ΔI = pertambahan dalam penanaman modal

Agar dari masa ke masa pertambahan alat-alat modal yang digunakan secara penuh dari alat-alat modal yang terjadi maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

$$\Delta Y_s = \Delta Y_d$$

di mana $\Delta Y_s = \sigma \cdot I$ dan $\Delta Y_d = \frac{1}{1-\alpha} \cdot \Delta I$

sehingga:

$$\sigma \cdot I = \frac{1}{1-\alpha} \cdot \Delta I$$

$$\sigma = \frac{\frac{1}{1-\alpha} \cdot \Delta I}{I}$$

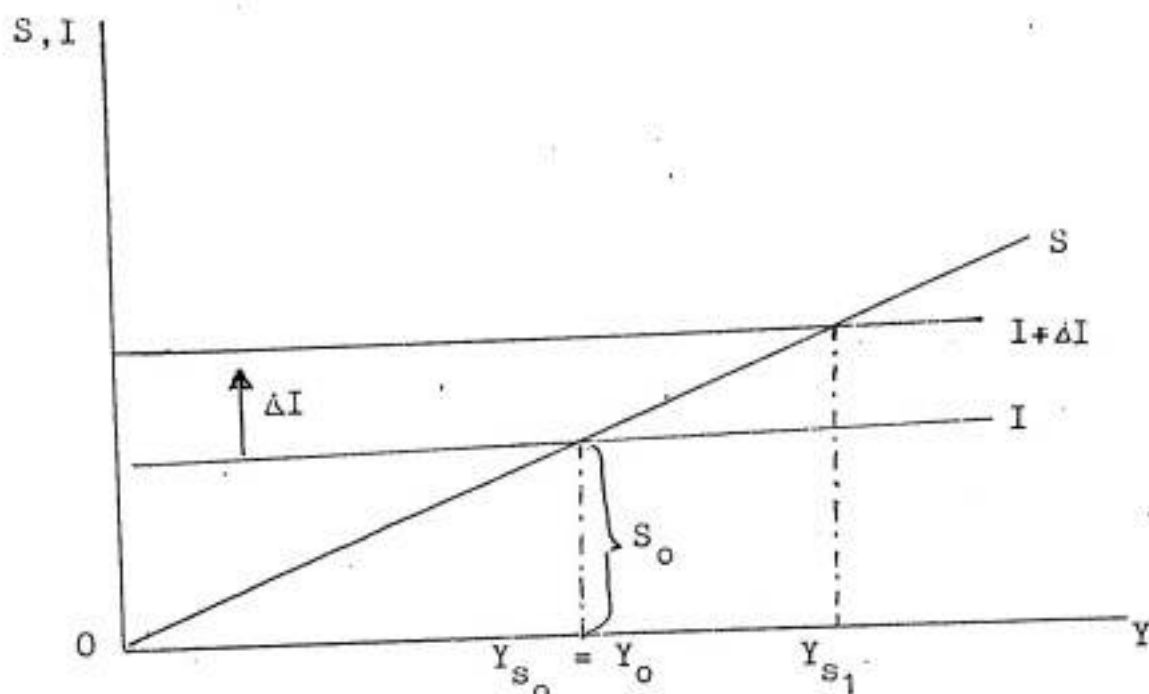
$$\sigma = \frac{\frac{1}{1-\alpha} \cdot \Delta I}{I} \implies \sigma = \frac{\Delta I}{(1-\alpha)I}$$

$$\text{atau; } \sigma \alpha = \frac{\Delta I}{I}$$

¹² Sadono Sukirno, op.cit., hal. 290

Dengan demikian maka dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa agar suatu perekonomian selalu mencapai tingkat kapasitas penuh dalam penggunaan modal yang tersedia maka tingkat penanaman modal harus berkembang sebesar ΔI .

Atau lebih jelasnya teori tentang akumulasi modal dari Harrod-Domar ini dapat kita formulasikan dalam suatu gambar sebagai berikut:



Gambar 3.1. Gambaran dari teori Harrod-Domar

Dalam gambar 3.1. dapat dijelaskan bahwa S adalah fungsi tabungan, dan karena teori tersebut menyebutkan bahwa tingkat tabungan masyarakat adalah proporsional dengan tingkat pendapatan masyarakat maka fungsi tersebut dimulai dari titik nol (0). Kemudian dikatakan pula bahwa pada permulaannya perekonomian telah mencapai tingkat penggunaan sepenuhnya atas alat-alat modal yang tersedia, di mana tingkat tersebut berada pada titik $Y_{S_0} = Y_0$, di mana Y_{S_0} adalah jumlah keseluruhan alat-alat modal pada tahun permulaan

dan Y_0 adalah pendapatan pada tahun tersebut. Sebagai akibat dari pemisalan ini maka pada tahun tersebut penanaman modal haruslah mencapai sebesar tabungan pada tingkat kapasitas penuh dari alat-alat modal, Jadi $I = S_0$. Adanya penanaman modal ini akan menaikkan kapasitas alat-alat modal dari Y_{S_0} menjadi Y_{S_1} , dan agar kapasitas alat-alat modal yang telah menjadi Y_{S_1} tersebut sepenuhnya digunakan maka penanaman modal dalam tahun tersebut harus mencapai sebesar $I + \Delta I$. Dari uraian terdahulu bahwa $\frac{\Delta I}{I} = \sigma \alpha$ yang berarti bahwa $\Delta I = \sigma \alpha \cdot I \implies I + \Delta I = I + \sigma \alpha \cdot I$ atau $I + \Delta I = (1 + \sigma \alpha) I$.

3.1.2. Modal Bagi Koperasi

Sama halnya dengan pelaku ekonomi lainnya, koperasi juga sangat membutuhkan modal dalam memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli bahwa modal merupakan faktor yang sangat penting di dalam peningkatan produksi, jadi untuk meningkatkan volume maupun kualitas dari produk yang dihasilkan oleh koperasi yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai perkembangan yang lebih baik maka dibutuhkan persediaan modal yang memadai. Sumber modal ini banyak macam dan jenisnya, misalnya modal yang berupa barang-barang yang tergolong ke dalam aktiva tetap, investasi, deposito, dan lain-lain sebagainya.

Yang lebih terperinci lagi tentang sumber modal bagi koperasi adalah terdiri dari empat, yaitu modal yang bera-

sal dari anggota, pinjaman, hasil usaha, dan penanaman modal. Kemudian penggunaan modal ini ada empat macam yaitu: modal untuk organisasi dengan menentukan kebutuhan koperasi dan berapa besar usahanya, modal untuk alat perlengkapan koperasi, modal kerja dan modal untuk uang muka. Karena koperasi lebih bersifat sosial dibanding dengan perusahaan swasta maka dalam penarikan modal, koperasi selalu mengalami kesulitan, yang pada akhirnya keuntunganpun akan relatif sulit untuk diperoleh sebagaimana apa yang diharapkan.

Modal memang merupakan masalah yang paling esensial bagi kehidupan koperasi, karena mati hidupnya koperasi ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri, namun kalau kita kembali pada keberadaan koperasi yang bukan merupakan kumpulan modal tetapi suatu kumpulan orang-orang, maka modal seakan bukanlah suatu keharusan. Namun demikian kita tidak bisa pungkiri bahwa modal selalu menjadi hambatan bagi suatu koperasi, karena pada umumnya hanya orang-orang yang benar-benar sadar dan mengerti tentang pentingnya koperasilah yang mau menanamkan modalnya pada koperasi. Karena kalau kita berfikir tentang tingkat bunga maka lebih baik kita menanamkan modal kita pada bank-bank yang dapat memberikan pembayaran tingkat bunga yang relatif lebih tinggi bila dibanding dengan tingkat bunga yang berlaku di koperasi. Selain itu umumnya anggota koperasi adalah orang-orang yang kekurangan modal, jadi mereka hanya mengharap dari koperasi.

Sesuai dengan sumbernya maka modal koperasi itu dapat digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu:¹³

1. Modal yang berasal dari dalam koperasi
 2. Modal yang berasal dari luar koperasi
- Modal dari dalam koperasi harus dijadikan dasar atau pokok bagi modal koperasi. Setelah modal dari dalam koperasi dirasakan masih kurang maka barulah dicari jalan lain dari luar koperasi.

Sedangkan dari kedua sumber di atas masih dapat dirinci sesuai dengan sumber masing-masing yaitu:

- a. Simpanan Anggota; dari simpanan anggota ini dapat digali suatu modal yang dapat dijadikan dasar bagi usaha untuk mengembangkan koperasi. Simpanan ini ada tiga macam yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok adalah simpanan yang dihabiskan bagi anggota yang baru masuk, dan besarnya sama bagi setiap anggota. Simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan bagi anggota jumlah minimumnya, sedangkan jumlah maksimumnya tidak dibatasi, dan ini biasanya dibayar pada waktu-waktu tertentu. Simpanan sukarela adalah simpanan jumlah dan waktunya tidak ditentukan dengan pasti. Dari sini dapatlah dilihat jika ketiga simpanan ini berjalan sesuai keinginan koperasi, tidak perlu lagi mencari tambahan dari yang lainnya.

Harsoyono Subyakto & Bambang Tri Cahyono, *Ekonomi Koperasi*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 71-72

- b. Sisa Hasil Usaha; yaitu seluruh penghasilan koperasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional koperasi. Untuk dijadikan sebagai modal yang utama dalam koperasi, sisa hasil usaha masih kurang bisa diharapkan karena jumlah cadangan ini tidak begitu banyak terutama pada koperasi yang kecil-kecil, lagi pula ini sangat bergantung dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh. Lagi pula dari keseluruhan keuntungan ini tak semua keuntungan bersih jatuh ke dalam kas koperasi. Karena dari keuntungan bersih ini masih harus dibagi-bagi lagi, di mana di antaranya adalah pembagian keuntungan untuk seluruh anggota, dan dana pendidikan, perluasan daerah kerja, dan setelah itu barulah kira-kira berapa bagiannya digunakan sebagai cadangan untuk modal koperasi selanjutnya.
- c. Simpanan dengan sistem berjangka; hal ini dimungkinkan untuk menambah modal koperasi, karena simpanan berjangka ini menawarkan bunga yang tinggi terhadap para nasabah atau penabung. Jadi dengan adanya simpanan berjangka ini maka kemungkinan besar dapat menyerap dana yang cukup besar untuk dijadikan sebagai modal koperasi.
- d. Pinjaman dari luar; hal ini sebenarnya juga dapat dilakukan dengan meminjam dari anggota koperasi itu sendiri, yang disamakan jika meminjam dari pihak luar. Tetapi berhubung karena dari pihak anggota sendiri rata-rata kekurangan uang maka yang dapat dikembangkan adalah meminjam dari pihak luar seperti dari bank-bank.

e. Modal dari pasaran uang; modal ini hanya dapat berhasil dengan baik jika koperasi tersebut benar-benar sudah bonafide dan berusaha secara besar-besaran, sehingga bagi anggota tidak perlu merasa khawatir lagi bila membeli obligasi atau saham yang dikeluarkan koperasi.

3.2. Kredit Perbankan

Keperluan akan kredit semakin dirasakan dan dengan berbagai corak, ragam alasan dan latar belakangnya, baik perusahaan, perorangan, negara atau bangsa, dengan berbagai kepentingan dan alasan berusaha untuk mendapatkan kredit.

Sehubungan dengan hal tersebut, otoritas pemerintah dengan sengaja membentuk atau memberi kebebasan kepada badan-badan tertentu untuk bertugas sebagai penyedia kredit bagi mereka yang membutuhkannya. Hal ini dimaksudkan agar para penduduk atau rakyat mendapatkan kesempatan memperoleh kredit secara legal demi peningkatan usaha atau keperluan-keperluan lainnya. Selain yang berdasarkan otoritas pemerintah maka ada juga kalangan yang penghidupan bebas atau swasta yang baik disengaja atau tidak disengaja menyediakan modal, tertentu atau keuangan yang kebetulan lebih untuk digunakan sebagai kredit. Penyedia dan penyalur kredit yang dimaksud biasa dilakukan oleh bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya, baik pemerintah maupun swasta. Dengan tersedianya lembaga-lembaga tersebut maka mekanisme penyaluran kredit dapat berjalan lancar.

3.2.1. Kebutuhan Kredit

Ada berbagai hal yang menyebabkan kredit itu terasa penting artinya di antaranya adalah karena keperluan modal kerja, pembelian alat-alat, pengeluaran usaha, pembayaran hutang, bahkan untuk makan sehari-daripun merupakan salah satu contoh yang menyebabkan betapa pentingnya arti kredit bagi kehidupan kita sehari-hari.

Sebenarnya kalau kita melihat secara lebih jauh lagi maka alasan dan latar belakang mengapa suatu pihak membutuhkan kredit adalah lebih luas dan rumit dibandingkan dengan dasar-dasar pertimbangan pemberi kredit di lain pihak mengapa ia memberikan modalnya dipakai sebagai kredit. Bagi kedudukan pihak kedua ini latar belakang pemberian kredit lebih terbatas dan pada umumnya sudah mempunyai garis-garis pertimbangan yang mudah ditentukan. Lain halnya dengan alasan dan latar belakang kebutuhan pemakai kredit. Ia dalam hal ini ingin mendapatkan pertolongan kredit didasarkan pada *notwendigkeit* atau keharusan yang ukurannya sangat subjektif yaitu tergantung pada pandangan sendiri dalam hal menanggapi suatu situasi yang menyelubungi pribadi baik material maupun spiritual.

Sesuai dengan penjelasan lalu maka pemberian kredit dan penggunaan kredit sebenarnya sangat dalam artinya jika dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, khususnya jika ingin menerapkan falsafah perkreditan secara tetap dan tepat. Namun kalau kita amati secara mendetail maka pada umumnya seseorang atau badan usaha butuh kredit untuk tujuan pro-

duktif karena apabila mereka mengambil kredit karena didorong oleh motif yang konsumtif maka mereka akan akan kelabakan sendiri karena disamping harus mengembalikan pokok pinjaman itu, juga harus membayar bunga.

3.2.2. Perkreditan Bank/Lumbung Desa, Bank Pasar dan Rumah Gadai¹⁴

Kredit tani (petani), kredit kecil dan bank/lumbung desa serta bank pasarnya merupakan saudara sekandung yang menurut sejarahnya dilahirkan oleh gagasan Volkscredietwezen dalam zaman pemerintahan kolonial Belanda. Irama dan masalahnya masih tetap sama, rumit dan sulit, tetapi mutlak harus dicari pemecahannya.

Bank lumbung desa sebagai kaki tangan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berkecimpung dalam perkreditan kecil sampai jauh ke pelosok-pelosok itu merupakan tulang punggung yang patut dipelihara dan ditingkatkan dalam taktis operasionalnya.

Kini di pasar-pasar kecuali diselenggarakan oleh BRI sudah mulai hidup pula bank-bank pasar yang disponsori oleh usaha organisasi swasta, suatu pertanda yang menggembarakan, lepas dari unsur komersial sebagai latar belakangnya.

Tetapi yang pasti, masalah kredit kecil ini hanya da-

¹⁴ R. Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 197 - 199

pat dilaksanakan secara intensif oleh "otoaktivitas" rakyat sendiri, rakyat yang berkepentingan dan membutuhkan bimbingan, tuntutan serta fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah dan aparatur-aparaturanya.

Desa sebagai lembaga administrasi pemerintah resmi di mana terdapat potensi unit ekonomis yang terjauh dan tersebar menyeluruh, dapat dijadikan basis operasional perkreditan kecil yang tepat. Menurut sejarahnya bank/lumbung desa demikian pula. Adanya lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) sebenarnya sudah terbuka jalan untuk mengkonkretkan gagasan asli berdirinya lembaga-lembaga perkreditan desa dengan taktis operasional yang benar-benar memenuhi kebutuhan unit ekonomis dalam masing-masing desa. Jika struktur bank/lumbung desa gaya lama tidak cocok lagi dan tidak disukai oleh rakyat, harus dicari penggantinya yang menurut irama zaman dapat diterima. Bagaimanapun juga perkreditan kecil ini mempunyai segi-segi psikologis lain dan menurut kondisi dan situasi setempat tetap dibutuhkan oleh masyarakat desa. Menurut unsur-unsur yang hidup dalam pedesaan dan masalah perkreditan kecil yang kompleks, kiranya pengurusan dan status lembaga-lembaga dalam desa untuk kredit kecil akhirnya paling baik dan sesuai adalah koperatif dengan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai wadahnya (koordinatonya), dengan bimbingan, pengawasan dan bantuan modal dari aparatur-aparatur pemerintah yang berwenang dalam bidang tersebut.

Walaupun rumah gadai percabangannya lebih luas dari perbankan, karena mencapai sampai pada setiap kawedanan, tetapi toh belum sampai ke desa. Kini kawedanan dihapus dan unit kecamatan langsung di bawah bupati. Seandainya struktur dan taktis operasionalnya dapat dikawinkan dengan lembaga perkreditan di desa-desa maka satu kemajuan selangkah sudah tercapai.

3.2.3. Peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam pengembangan Koperasi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 pasal tiga tentang tugas pokok Bank Sentral, Bank Indonesia selaku otoritas moneter mempunyai tugas pokok yaitu membantu pemerintah dalam berbagai hal seperti :

1. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh perbankan di Indonesia.

Melalui derebulasi demi deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang dimulai sejak 1 Juni 1983 dan kebijaksanaan lanjutan Paket 27 Oktober 1988, tampak jelas usaha pemerintah untuk meningkatkan dunia perbankan dan sektor keuangan pada umumnya dalam menunjang dunia usaha, khususnya dalam rangka mendorong, mempertahankan, dan memelihara pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ser-

ta perluasan kesempatan kerja. Dengan serangkaian paket kebijaksanaan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya diharapkan akan meningkatkan pengarahannya melalui kemudahan pembukaan kantor bank, pembukaan kantor cabang LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank), pendirian bank swasta baru, pendirian BPR (Bank Perkreditan Rakyat), penerbitan sertifikat deposito bagi bank dan LKBB dan perluasan tabungan.

Dalam kaitan peranan BPR dalam pengembangan koperasi khususnya dan ekonomi pada umumnya perlu dikemukakan bahwa dengan Paket Kebijakan Oktober 1988 yaitu Pakto atau lebih lengkapnya dikenal dengan Pakto 27 maka :

1. Larangan pendirian dan usaha BPR (bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, bank kredit kecamatan, dan/atau lembaga-lembaga sejenis) yang diberlakukan sejak tahun 1971 telah dicabut.
2. Melalui BPR pengalihan dana masyarakat khususnya di kecamatan-kecamatan di luar ibukota negara, daerah tingkat I, daerah tingkat II dapat ditingkatkan dan pada gilirannya dana masyarakat tersebut dapat disalurkan kembali kepada masyarakat termasuk koperasi.

Dari perkembangan BPR sejak jaman penjajahan sampai pada saat ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaannya sangat membantu kehidupan perekonomian masyarakat kecil terutama yang berada di pedesaan. Secara absolut peranan BPR memang relatif masih kecil bila dibanding dengan peranan lembaga perbankan pada umumnya, namun apabila dilihat dari cakupan

jumlah penduduk peranannya sangat besar.

Koperasi sebagai badan usaha yang mempunyai karakter yang spesifik bila dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya, sebagai unit usaha yang merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal (sepaimana pada perusahaan Perseroan dan Badan Usaha Milik Negara) tugas pokoknya yaitu membantu para anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan tidak melepas aspek sosial yang selama ini lebih menonjol, diharapkan sesuai perkembangan, badan usaha koperasi dapat juga segera menggeser pandangannya ke arah orientasi bisnis. Semua pihak yakin bahwa di satu sisi koperasi mempunyai kemampuan untuk menghimpun dan manjangkau masyarakat banyak khususnya masyarakat di pedesaan yang pada umumnya terdiri dari masyarakat golongan ekonomi lemah, meskipun di sisi lain koperasi mempunyai kelemahan khususnya di segi permodalan disamping manajemen. Permasalahan inilah yang cukup mendasar bagi koperasi yang harus dapat diatasi, supaya menjadikan fungsi koperasi benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia.¹⁵

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan paket 27 Oktober 1988 maka :¹⁶

1. Pendirian bank umum selain bank milik negara dengan undang-undang, juga dapat dilakukan dalam bentuk PT dan Koperasi (BUKOPIN)

15 Tontowi Djauhari Lintang, Peranan BPR dalam Pengembangan Koperasi di Indonesia Timur, Makalah, 1992, hal.2

16 op.cit., hal. 4-5

2. Pendirian BPR dapat dilakukan dalam bentuk PT. (Perseoran Terbatas), PD (Perusahaan Daerah) dan koperasi.

Dari ketentuan ini jelas bahwa bentuk hukum usaha koperasi dapat melakukan usaha bank baik bank umum atau BPR. Dalam kaitan peran BPR terhadap pengembangan koperasi, maka BPR dapat didirikan dalam bentuk koperasi dan BPR sebagai bank dapat melayani koperasi-koperasi sebagai nasabah.

3.2.4. Berbagai Kebijakan Perbankan untuk Pengembangan Koperasi

Dari segi penyediaan fasilitas kredit, sejak tahun 1973 telah diintrodusir KIK/KMKP, kemudian KI dan KMK sampai dengan Rp 75 juta, kredit dalam rangka Kepres 29/1984 di samping kredit-kredit program lainnya (BIMAS, INMAS, Candak Kulak dll.) yang kesemuanya ditujukan untuk pengembangan usaha kecil termasuk koperasi.

Kebijakan perbankan yang terakhir yang menunjang usaha kecil termasuk koperasi terutama ditekankan pada perkreditan sebagaimana telah ditetapkan dalam Paket Kebijakan 29 Januari 1990.

Yang mana pokok-pokok penyempurnaan sistem perkreditan tersebut terinci sebagai berikut :

1. Kredit perbankan yang masih ditunjang oleh KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) adalah KUT (Kredit Usaha Tani) yaitu kredit koperasi untuk pengadaan pangan dan kegiatan yang produktif, Kredit pengadaan pangan dan gula oleh Bu-log, serta kredit investasi.

2. Tingkat suku bunga pada poin 1 di atas didasarkan pada suku bunga pasar.
3. Kredit-kredit selain yang tersebut dalam poin 1 di atas dibiayai sepenuhnya dengan dana yang diupayakan sendiri oleh perbankan.
4. Sebahagian dari kredit perbankan diarahkan untuk membiayai usaha-usaha kecil.

Jadi jelasnya bahwa : Penyediaan KLBI dalam jumlah yang terbatas hanya diberikan untuk mendukung pelestaria swasembada pangan, pengembangan koperasi serta peningkatan investasi; Kredit perbankan yang tidak didukung oleh KLBI adalah kredit umum dan Kredit Usaha Kecil (KUK).

Khusus mengenai KUK kepada perbankan diwajibkan untuk menyalurkan 20% dari portofolio kreditnya diperuntukan bagi usaha kecil serta koperasi. Agar supaya pengembangan usaha kecil dan koperasi melalui pemberian KUK tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif maka pemenuhan ketentuan jumlah KUK tersebut dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.

✓ Dari ketentuan-ketentuan di atas jelas terlihat betapa seriusnya pemerintah kita dalam memperhatikan dan melakukan usaha-usaha terobosan agar koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia mampu tumbuh dan berkembang serta dapat bersaing dengan unit ekonomi lainnya. Oleh karena itu modal utama yang harus dimiliki untuk mengembangkan badan usaha koperasi pada sikap daya juang dan kemampuan koperasi sendiri untuk mengelola secara profesional.

3.3. Pengembangan Koperasi

Menurut Harsoyono Subyakto dan Bambang Tri Cahyono dalam bukunya "Ekonomi Koperasi,"¹⁷ bahwa pada umumnya perkerasiasaan di Indonesia mengalami dua pola pengembangan yaitu:

1. Pola umum atau pola konvensional, yaitu pola pengembangan koperasi berdasarkan ajaran umum koperasi
2. Pola KUD yaitu pola pengembangan dengan bantuan, dorongan dan pengawasan dari pemerintah.

ad.1 Menurut pola ini bahwa pengembangan koperasi diserahkan penuh kepada masyarakat. Prosedur pembentukuan koperasi dan tata kerja sepenuhnya dilakukan menurut asas demokrasi dan sukarela di mana kedudukan pemerintah hanya sebagai pelindung, pengawas, dan pembimbing jalannya koperasi sesuai dengan UU No. 12/1967.

ad.2 Pada pola ini diupayakan adanya pembentukan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai persiapan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD), sebagaimana peranan BUUD adalah merupakan penunjang program BIMAS yang wilayah kerjanya di pedesaan dan pola kerjanya kemudian dimantapkan oleh inpres No. 4/1973 kemudian menyusul inpres No. 2/1978.

Wilayah kerja KUD yang menurut inpres No. 2/1978 ditetapkan sewilayah kecamatan, namun dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan nomor 593A/Kpb/1979 tentang wilayah keanggotaan dan wilayah kerja usaha KUD serta wilayah kerja BUUD, ditentukan wilayah keanggotaan KUD sebagai berikut:

¹⁷ Harsoyono Subyakto & Bambang Tri Cahyono, op. cit. hal. 86

1. Potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat yang terdapat di dalam wilayah keanggotaan tersebut cukup mampu menunjang dan memperlancar pertumbuhan dan perkembangan koperasi unit desa (KUD) untuk menjadi satu sarana ekonomi yang mantap dan cukup luas yaitu meliputi lebih dari satu desa dalam satu kecamatan.
2. Kemampuan pelayanan KUD harus mampu melayani berbagai kebutuhan para anggota masyarakat di wilayah keanggotaannya sehingga kegiatan meliputi berbagai kemungkinan bidang ekonomi.

3.3.1. Strategi Pengembangan Koperasi

Menurut Sri-Edi Swasono dalam buku "Ekonomi Indonesia" bahwa strategi pengembangan koperasi adalah sbb.:¹⁸

(1) Meningkatkan kesadaran berkoperasi baik dalam kaitannya dengan ideologi negara dan cita-cita konstitusi, maupun dengan kaitan koperasi sebagai badan usaha efektif dan masuk akal dalam rangka pembangunan yang bertitik tolak dari dan untuk manusia; (2) Membentuk/menyusun jaringan koperasi (cooperative network) vertikal dan horizontal. Dengan jaringan koperasi ini kesatuan dan keserempakan gerak serta kerjasama kelembagaan bisnis antar koperasi akan mudah terbentuk menjadi solidaritas. Transfer of knowledge dan transfer of experience dalam pola kerjasama tolong menolong secara terkoordinir lebih mudah terlaksana; (3) bekerjasama seluas-luasnya dan diupayakan agar lebih baik, seintensif

¹⁸ Moh. Arsjad, Sri-Edi Swasono, Iwan Jaya Azis, Ekonomi Indonesia, UIP, Jakarta, 1989, hal. 372 - 374

mungkin dengan pemerintah, khususnya dengan Departemen Koperasi demikian pula dengan instansi-instansi pemerintah lainnya. Hal ini berarti ikut membina KUD-KUD ke arah kemajuan dan ke arah kemandirian; (4) Meningkatkan kerjamama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat khususnya yang bergerak di bidang perkoperasian; (5) Memperkuat tegaknya pilar-pilar koperasi (cooperative infrastructure) seperti bank koperasi (BUKOPIN), Asuransi Koperasi (KAI), sistem koperasi induk (sekunder, tersier), kelompok tani, sistem koperasi unit desa, sistem PIR, audit koperasi (KJA), lembaga jaminan koperasi (Perum PKK), dan sistem perundangan; (6) Meningkatkan kerjasama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta). Ketiga pelaku ekonomi di Indonesia semuanya terikat dengan demokrasi ekonomi. Dari BUMN diharapkan adanya keterkaitan usaha dalam pola interdependensi. Dengan pihak swasta demikian pula dengan perhatian khusus terhadap pemilikan saham oleh karyawan/koperasi karyawan dalam proses demogratisasi ekonomi; (7) Meningkatkan kerjasama dengan gerakan-gerakan koperasi luar negeri, di tingkat internasional maupun regional, multilateral maupun bilateral; (8) Ikut aktif bersama pemerintah dan DPR menangkal ke tingkat makro sistem liberalistik dan kapitalistik yang masih berlaku (macro reform). Dan di tingkat mikro melindungi koperasi dan mengembangkan melalui usaha-usaha bisnis yang sehat dan rasional (micro reform); (9) Menyusun tahapan-tahapan menuju kemandirian, yang meli-

puti usaha pementapan pelaksanaan kelembagaan, perluasan kegiatan bisnis dan jangkauan serta jaringan usaha yang semakin modern; (10) Memperkuat kelembagaan DEKOPIN sebagai suatu harapan agar sesuai dengan fungsinya dan tuntutan masyarakat maju. Pendidikan perkoperasian perlu ditangani dan ditingkatkan melalui kurikulum nasional secara integratif.

3.3.2. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

Pada pasal 33 UUD 1945 dan GBHN telah ditegaskan bahwa koperasi adalah bangun usaha yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi. Dengan koperasi, masyarakat di pedesaan tergalang untuk ikut serta mengembangkan usaha dalam satu unit ekonomi yang lebih kokoh, lebih efektif dan efisien dengan bentuk KUD.

Yang diharapkan dalam hal pembinaan koperasi ini antara lain adalah agar koperasi dapat menjadi soko guru perekonomian di Indonesia pada umumnya dan di pedesaan pada khususnya. Hal ini berarti mampu menjadi pelayan dan wadah utama dalam berbagai kegiatan ekonomi pedesaan yang efektif dan efisien serta memiliki fungsi-fungsi perkreditan, penyediaan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi, dan kegiatan perekonomian lainnya. Kemudian diharapkan pula agar KUD mampu berswakarsa dan berswakarya dengan jalan memiliki anggota yang aktif dengan jumlah yang cukup memadai, memiliki pengurus yang berjiwa kewirakoperasian; mempunyai idealisme dan dedikasi yang ting-

gi, mampu mempekerjakan manajer dan staf yang profesional, memiliki badan pemeriksa yang cakap dan bertanggung jawab serta memiliki sistem manajemen yang baik. Selanjutnya untuk mewujudkan KUD sebagai soko guru perekonomian rakyat pedesaan, menurut Harsoyono Subyakto-Bambang Tri Cahyono:¹⁹ Bahwa harus ada program pemerintah yang mengarah pada pembinaan dan pengembangan KUD karena KUD belum mampu menjalankan usahanya secara sendiri karena masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup berat, baik permasalahan yang bersifat eksteren maupun permasalahan interen. Permasalahan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat belum sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan-kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya, belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang menyeluruh dan terpadu, serta prasarana yang belum memadai untuk membangkitkan kegairahan berkoperasi seperti yang dicita-citakan, hal-hal inilah yang dikenal sebagai permasalahan eksteren. Sedang permasalahan yang bersifat interen adalah bahwa KUD mempunyai kelemahan dalam organisasi, manajemen, sarana usaha terutama permodalan, kurangnya pengarahan yang menyeluruh dan berkesinambungan dalam hal pengembangan ekonomi dari KUD tersebut.

Apabila bimbingan yang dimaksud di atas terlaksana

19 Harsoyono Subyakto & Bambang Tri Cahyono, *Ekonomi Koperasi*, op. cit., hal. 95 - 98

maka diharapkan akan terjadi hal yang demikian; Dengan bimbingan dan bantuan pemerintah, KUD berusaha memecahkan masalah-masalahnya dengan jalan pertama-tama memberi pelayanan terhadap para anggota dan calon anggota, selanjutnya mengidentifikasi anggota dengan penyuluhan-penyuluhan yang intensif, pengerahan KUD untuk menjadi koperasi serba usaha dengan menggunakan potensi daerah masing-masing agar apa yang diharapkan dapat tercapai.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan organisasi interen KUD adalah tata hubungan kerjasama antar fungsionaris KUD harus ditata kembali dan disempurnakan selain itu rakyat di pedesaan yang merupakan landasan dasar kegiatan koperasi harus dilayani dan dibina agar menjadi anggota yang aktif berpartisipasi. Kemudian kita juga harus ingat bahwa organisasi eksteren perlu juga disempurnakan dengan menildian dan penataan kembali tata hubungan kerja antar KUD atau antar KUD dengan organisasi sekundernya.

Bila dilihat dari segi manajemen, setiap anggota koperasi mempunyai hak sama dan tidak tergantung banyaknya simpanan yang dimilikinya, pengurus koperasi harus melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh rapat anggota. Tiap langkah dan gerak usaha harus diketahui oleh anggota sebagai pemilik usaha koperasi agar para anggota dapat menikmati manfaat dan hasil yang sebesar besarnya.

Dalam hal pengamanan program peningkatan usaha KUD maka para administrasi usaha mutlak perlu untuk terus dikembangkan dan dimantapkan adanya suatu standar sistem dan prosedur administrasi usaha yang berlaku bagi KUD. Untuk hal yang demikian ini maka seluruh KUD ditata kembali sistem akutansinya dan pengawasan interennya melalui Pusat-Pusat Administrasi Usaha (PAU).

Karena terbatasnya dana, daya dan waktu maka perlu diletakkan strategi yang tepat dalam upaya pembinaan dan pengembangan KUD. Sesuai dengan pendekatan kapasitas usaha dan harga pasar serta pendekatan manajemen, maka strategi yang digunakan ialah strategi pemusatan pelayanan koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam usaha pengembangan KUD tanpa mempengaruhi usaha swadaya masyarakat sendiri, sebagai jembatan untuk mempertemukan kebijaksanaan pembinaan pemerintah dengan usaha swadaya masyarakat di suatu lingkungan organisasi yang dipandang lebih efisien dan efektif, baik oleh pemerintah sebagai pembina maupun oleh KUD sebagai wadah yang dibina, untuk kemudian meningkatkan daya saing KUD tersebut dan dalam jangka panjang dapat mengembangkan skala usaha yang lebih besar.

3.4. Penerapan Ekonomi Mikro dalam Koperasi

Untuk maju dan berkembang, maka koperasi diharapkan agar mampu bukan saja condong ke arah watak sosial dari koperasi tetapi juga harus memperhitungkan aspek ekonomi-

nya agar dapat sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya dalam hal menjaga kesinambungan kehidupannya, baik dalam jangka pendek dan terlebih lagi dalam jangka panjang.

Di sini koperasi sudah saatnya untuk memikirkan masalah biaya produksi, profit, pendapatan, kepuasan, produksi maksimum, promosi, dan harus selalu memperhatikan mekanisme pasar yang terjadi. Karena mekanisme pasar merupakan suatu aturan permainan yang utama maka koperasi harus mampu bersaing dengan bentuk badan usaha yang lain sehingga koperasi dapat hidup berdampingan dengan badan usaha yang dimaksud (BUMN dan Swasta). Selama ini koperasi selalu diberikan suatu keistimewaan dibanding dengan dua pelaku ekonomi lainnya, namun janganlah hal tersebut menjadikan koperasi seakan manja dan tidak memikirkan bagaimana bersaing di pasar.

Koperasi dibentuk karena memberikan manfaat bagi para anggotanya dengan memperkuat posisi pasarnya sehingga harga jual bisa lebih tinggi, menghemat biaya-biaya tertentu atau meningkatkan efisiensi suatu proses tertentu, menimbulkan eksternal ekonomis seperti kenaikan produktivitas para anggota koperasi karena penyebaran informasi pasar dan penyebaran informasi yang baik, serta manfaat-manfaat non ekonomis. Selain manfaat, anggota koperasi harus mengeluarkan biaya untuk koperasinya.

Apabila kita anggap koperasi berada dalam suatu pasar persaingan sempurna maka akan timbul dua kasus bila para penjual berminat untuk membentuk koperasi, yaitu kasus ko-

perasi sebagai kartel yang bertindak sebagai perusahaan monopoli dan kasus price leadership.²⁰

1. Kasus koperasi sebagai kartel; koperasi bisa meningkatkan harga jual dan keuntungan bersamanya tetapi hal ini hanya bisa terjadi kalau koperasi bisa membatasi produksinya sampai pada tingkat optimalnya yaitu pada tingkat output di mana jumlah Marginal Cost (MC) seluruh anggota koperasi sama dengan Marginal Revenue (MR) nya. Hal ini berarti koperasi harus meningkatkan kuota produksi dan menetapkan bagi anggotanya. Pada harga yang ditetapkan, secara individu anggota akan lebih untung bila melanggar kuota hal ini akan menimbulkan efek kecurangan-kecurangan dalam bentuk pelanggaran kuota yang menuju pada pemecahan, selain itu merangsang masuknya produsen baru yang tertarik pada keuntungan yang tinggi. Jadi dalam jangka panjang kelangsungan hidup koperasi dalam kasus ini tidak terjamin bila mencari keuntungan dengan menarik harga jual. Bila koperasi tetap ingin ditumbuhkan dalam situasi ini maka satu-satunya jalan mendorong koperasi agar bisa mengembangkan ekonomis of scale, external economies, dan manfaat lainnya dari adanya koperasi.
2. Kasus Price Leadership; dalam hal ini koperasi merupakan kelompok produsen yang jumlahnya cukup banyak untuk menentukan harga, akan menentukan harga yang memberikan keuntungan maksimal secara bersama-sama yaitu pada ting-

20 Harsoyono Subyakto & Bambang Tri Cahyono, op.cit.,
hal. 43 - 48

kat output di mana jumlah MC-nya seluruh anggota koperasi sama dengan MR-nya. Hal ini berarti koperasi harus menetapkan kuota produksi bagi anggotanya. Jadi anggota koperasi harus mengeluarkan cost untuk koperasi dan harus membatasi produksinya untuk dapat menikmati harga yang ditetapkan sedangkan produsen lain yang tidak tergabung di dalam koperasi turut menikmati harga tersebut tanpa menanggung biaya seperti yang dikeluarkan oleh para anggota koperasi.

3. Kasus bilateral monopoli; di sini koperasi sebagai produsen monopoli menghadapi satu pembeli. Koperasi akan menentukan harga yang paling menguntungkan dirinya, sedangkan pembeli juga akan menentukan harga yang akan menjadikannya Marginal Factor costnya sama dengan Demandnya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh koperasi karena pembeli hanya memperhitungkan supply dari produsen-produsen kecil sebelum membentuk koperasi. Tetapi karena koperasi juga memiliki kekuatan dalam menentukan harga maka terjadi tawar-menawar untuk mendapatkan harga kesepakatan, di sini terlihat arti penting dari manajemen koperasi dalam melaksanakan keputusan dan strategi bisnis yang tepat. Dalam kasus ini ada motivasi yang kuat dari penjual untuk bergabung dalam koperasi tidak perlu ada kuota produksi. Dalam hal ini strategi harga yang paling optimal bagi koperasi adalah harga pasar kompetitif, karena harga yang terlalu tinggi memerlukan menerapkan sistem kuota yang bisa men-

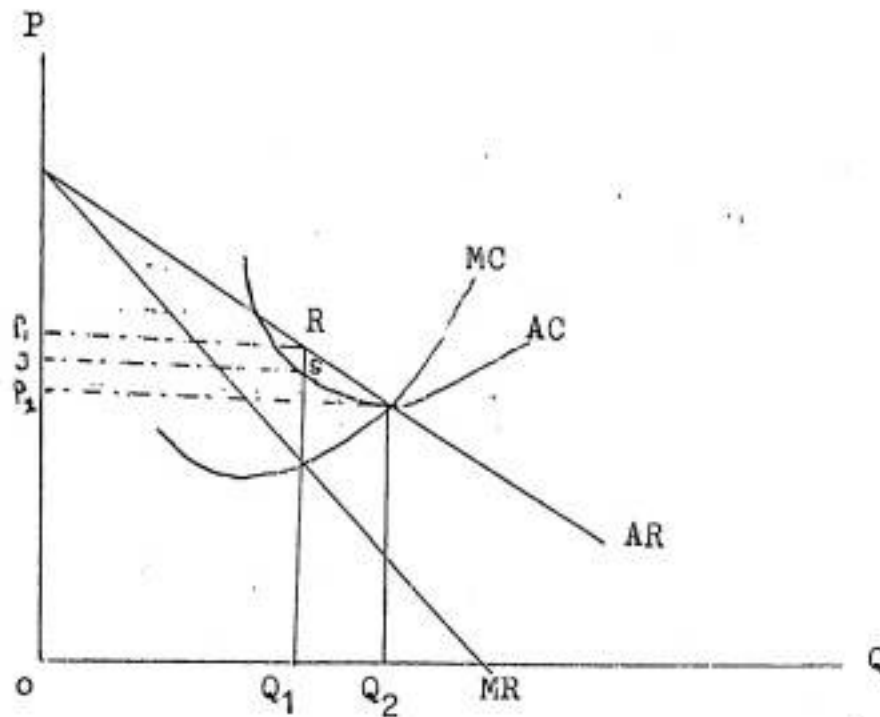
Jali sumber integrasi koperasi dari dalam.

4. Kasus monopoli parsial; dalam hal ini pembeli sebagai price maker akan menentukan harga yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan oleh koperasi (sebagai monopoli). Kasus ini hampir sama dengan kasus bilateral monopoly pada poin 3 tetapi kedudukan koperasi dalam menghadapi pembeli yang terbagi dalam satu pembeli besar dan banyak pembeli yang kecil-kecil yang bahkan lebih kuat. Dalam jangka panjang, adanya koperasi pada kedua kasus bilateral monopoli dan monopoli parsial ini mengundang masuknya saingan karena adanya keuntungan yang besar.

Agara koperasi tetap terjaga kelangsungan hidupnya baik dalam kasus pasar persaingan sempurna maupun yang tidak sempurna, maka diharapkan adanya manfaat dari kerja sama yang berasal dari adanya economies of scale external economies, dan manfaat-manfaat non ekonomis dengan meningkatkan efisiensi interen, bukan meningkatkan kedudukan monopolisnya di pasar.

Karena koperasi merupakan bentuk perkonomian Indonesia yang berwatak sosial maka koperasi harus lebih banyak memikirkan kesejahteraan para anggotanya namun karena koperasi bukanlah kumpulan orang-orang kaya maka harus ada jalan keluar untuk menjaga kelangsungan hidup koperasi, sebagaimana yang telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya. Dan yang lebih penting adalah kesesuaian dengan keadaan di sekelilingnya.

Untuk mengetahui bagaimana peranan koperasi dalam menghadapi pasar untuk pengadaan hasil produksi dan pengaruh terhadap harga di pasar maka dapatlah kita lukiskan dalam sebuah gambar sbb:



Gambar 3.2. Peranan Koperasi dalam Pengadaan Hasil Produksi dan Pengaruh terhadap Harga Pasar

Pada gambar 3.2. di atas dapat diperhatikan bahwa pada perusahaan-perusahaan, mereka menggunakan titik Q_1 sebagai outputnya dan titik P_1 sebagai harganya. Hal ini dilakukan karena pada titik inilah perusahaan memperoleh profit maksimum, sebab antara penghasilan dan biaya ada keuntungan sebesar P_1RSJ . Apalagi dalam jangka panjang, titik harga P_2 saja sudah memberikan keuntungan karena harga rata-rata masih di atas harga variabel. Sedangkan koperasi cenderung memproduksi pada titik Q_2 dan pada harga P_2 .

Produksi lebih besar, harganyaapun lebih murah. Kalaupun koperasi menggunakan Q_1 sebagai outputnya dan P_1 sebagai harganya, keuntungan ini tentu saja akan dinikmati oleh masyarakat juga, selain dari para anggota-anggotanya. Dengan demikian maka dapatlah kiranya koperasi sebagai stir atau pengendali, bagi produksi-produksi perusahaan lainnya, agar tidak sampai terjadi sistem monopolis di mana hanya ada satu produsen saja, sehingga bebas menentukan kebijaksanaan demi keuntungan pribadi semata.

Namun demikian, untuk mempengaruhi produksi secara keseluruhan, koperasi akan mengalami hambatan-hambatan karena masih banyak faktor yang turut berpengaruh di dalamnya. Koperasi ada yang merupakan kumpulan orang-orang, namun ada juga yang merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan. Hal yang terakhir ini dapat dikontrol dengan cara mengawasinya secara terus-menerus, atau dengan membuat suatu perjanjian. Tetapi inipun tidak bisa menjamin ketaatan-ketaatan dari perusahaan-perusahaan tersebut, karena pada dasarnya perusahaan-perusahaan ini menginginkan agar semua produksinya habis terjual, sehingga mendapat laba yang besar, apalagi bagi perusahaan-perusahaan yang memang bukan merupakan anggota dari koperasi. Karena mereka dapat saja secara bebas menentukan berapa yang mereka akan jual dan berapa yang akan diproduksi, itu adalah hak mereka tanpa larangan.

Dalam bidang penetapan harga, koperasi harus berhati-hati karena hal ini merupakan hal yang sangat peka. Kalau kurang jeli dalam menetapkan harga maka bisa-bisa para lang-

ganan pada berbalik haluan dan mencari harga yang lebih murah, yang berarti koperasi kehilangan penghasilan di masa-masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu adanya penyuluhan agar para anggota memahami bahwa tujuan koperasi itu berorientasi jangka panjang, jadi bisa saja dalam jangka panjang nanti kalau penjualan sudah meningkat maka tidak menutup kemungkinan harga akan kembali dan kesejahteraan para anggota akan meningkat.

B A B IV

KEBIJAKSANAAN PEMBENTUKAN MODAL DAN PENGARUH KREDIT PERBANKAN TERHADAP PENGEMBANGAN SEKTOR KOPERASI

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Modal Simpanan dan Modal Pinjaman

Selama masa observasi, pertumbuhan permodalan koperasi memperlihatkan kecenderungan yang semakin naik. Modal yang dimaksud terdiri dari modal yang berasal dari simpanan para anggota serta modal yang bersumber dari pinjaman dari pihak perbankan.

Kalau kita lihat dari pembentukan modal koperasi melalui simpanan anggota maka nampak jelas bahwa modal simpanan sejak dari tahun pertama Pelita I sampai dengan tahun kedua Pelita V memperlihatkan kenaikan sebesar Rp 625,5 milyar dari Rp 16,3 milyar (1969) naik menjadi Rp 641,9 milyar (1990), hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1. Pada tabel yang sama dapat puladilihat bahwa pada tahun pertama Pelita I (1969) realisasi modal koperasi yang bersumber dari simpanan anggota sebesar Rp 16,3 milyar, setahun kemudian modal simpanan ini telah mencapai Rp 29,3 milyar atau naik sekitar 78,9 persen dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun ketiga Pelita I (1971) modal simpanan ini telah mencapai Rp 47,3 milyar atau bertambah sebesar Rp 17,6 milyar dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 1972 hingga tahun 1974 modal simpanan memperlihatkan penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu berturut-turut Rp 46,5 milyar (1972),

Rp 45,4 milyar (1973) dan Rp 39,2 milyar (1974).

Memasuki Pelita II, modal simpanan kembali menunjukkan kenaikan yaitu sekitar 37 persen dari tahun sebelumnya, atau naik dari Rp 39,2 milyar (1974) menjadi Rp 53,6 milyar (1975) sebesar Rp 14,4 milyar, kemudian naik lagi sebesar Rp 23,6 milyar dari Rp 53,6 milyar (1975) menjadi Rp 77,2 milyar pada tahun 1976, kemudian kembali turun menjadi Rp 52,6 milyar (1977) dan Rp 61,2 milyar pada tahun 1978 (tabel 4.1).

Kalau kita melihat pertumbuhan modal koperasi yang bersumber dari simpanan anggota selama Pelita II maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan yang dialami relatif lebih kecil bila kita bandingkan dengan pertumbuhan pada Pelita I yang mencapai 29,1 persen, sedang pertumbuhan pada Pelita berikutnya yaitu Pelita II hanya mencapai pertumbuhan sebesar 11,8 persen pertahun.

Memasuki Pelita III, realisasi modal koperasi yang bersumber dari simpanan para anggota memperlihatkan kondisi yang cukup menggembirakan. Jumlah modal tertinggi selama Pelita III yaitu sebesar Rp 125,6 milyar yang terjadi pada tahun 1981 atau tahun ketiga Pelita III. Sedang pada tahun keempat dan kelima jumlah modal simpanan berturut-turut sebesar Rp 113,9 milyar (1982) dan Rp 122 milyar pada tahun 1983, sedang pada tahun pertama (1979) realisasi modal simpanan hanya mencapai Rp 67,9 milyar kemudian naik menjadi Rp 100 milyar (1980). Dan bila kita lihat rata-rata pertumbuhan modal simpanan selama Pelita III sekitar 15,8 persen pertahun, namun apabila kita banding-

kan antara realisasi simpanan pada tahun pertama dengan tahun terakhir Pelita III maka terlihat pertumbuhan yang relatif besar yaitu sekitar 79,7 persen dari Rp 76,9 milyar tahun 1979 naik menjadi Rp 122 milyar (1983).

Pada tahun pertama Pelita IV (1984), jumlah simpanan telah meningkat dengan pesatnya bila dibandingkan dengan keadaan Pelita III tahun terakhir (1983). Dalam jangka satu tahun modal simpanan telah meningkat sebesar Rp 50,3 milyar dari Rp 122 milyar (1983) menjadi Rp 172 milyar (1984) atau naik sekitar 41 persen. Setahun kemudian modal simpanan ini naik lagi sebesar 3 persen menjadi Rp 178 milyar pada tahun 1985. Dan yang paling menggembirakan adalah kenaikan yang dicapai pada tahun 1986 yaitu sekitar 133 persen dari tahun 1985 atau dari Rp 178 milyar (1985) naik menjadi sekitar Rp 415 milyar (1986). Dan seterusnya pertumbuhan-demi pertumbuhan dialami dari tahun ke tahun sampai pada akhir observasi (1990), (lihat tabel 4.1).

Di lain pihak pertumbuhan modal koperasi yang bersumber dari pinjaman juga semakin memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tabel 4.1. terlihat bahwa pada awal Pelita I (1969) realisasi modal koperasi yang bersumber dari pinjaman adalah Rp 19,3 milyar, kemudian naik menjadi Rp 36,7 milyar (1970) atau sekitar 90 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini terus melaju pada tahun-tahun berikutnya dan pinjaman tertinggi yang dicapai oleh koperasi selama Pelita I dicapai pada tahun 1972 atau tahun

keempat yaitu sebesar Rp 83,7 milyar. Kemudian mengalami penurunan sampai tahun ketiga Pelita II (1976) bila dibanding dengan tahun keempat Pelita I. Akan tetapi masih tetap meningkat bila dibanding dengan keadaan tahun 1971. Selanjutnya, realisasi pertumbuhan pertahun dari pinjaman koperasi selama Pelita I yaitu sekitar 40,6 persen pertahun, lebih tinggi bila dibanding dengan pertumbuhan modal koperasi yang bersumber dari simpanan koperasi selama Pelita I yaitu hanya sekitar 29,1 persen.

Pada tabel 4.1 juga terlihat bahwa memasuki tahun pertama Pelita II yaitu tahun 1974, realisasi modal pinjaman sedikit mengalami penurunan bila dibanding dengan keadaan pada tahun sebelumnya yaitu tahun terakhir Pelita I. Penurunan ini sampai mencapai 21 persen atau sebesar Rp 15,9 milyar dari Rp 75 milyar (1973) turun menjadi Rp 59 milyar, namun hal ini tidak berlangsung lama dan bahkan pada tahun keempat Pelita II realisasi modal koperasi yang bersumber dari pinjaman memperlihatkan kuantitas yang cukup menggebirakan yaitu sampai mencapai Rp 202,5 milyar atau Rp 143 milyar lebih besar dari keadaan tahun pertama Pelita II, yang hanya Rp 59 milyar. Keadaan ini terus berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang naik dan kadang turun. Namun kalau kita perhatikan trendnya maka nampak bahwa sejak Pelita I sampai tahun terakhir observasi (1990) atau tahun kedua Pelita V, modal koperasi yang bersumber dari pinjaman masih memperlihatkan kecenderungan menaik.

Dan yang paling penting di sini adalah bahwa perubahan-perubahan dari posisi pinjaman ini relatif dipengaruhi oleh berbagai kebijaksanaan pemerintah yang terus mengikuti perkembangan koperasi. Dan apabila kita memperhatikan perkembangan modal koperasi yang bersumber dari pinjaman selama Pelita II, terlihat bahwa realisasi pertumbuhannya pertahun hanya berkisar 20,1 %, yang berarti bahwa pertumbuhan modal koperasi yang bersumber dari pinjaman selama Pelita II relatif agak lamban, terlebih apabila kita bandingkan dengan pertumbuhan pada Pelita I yang mencapai 31,1 % pertahun.

Mengantisipasi lambannya pertumbuhan permodalan koperasi, pemerintah senantiasa mencari terobosan-terobosan baru yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi agar kelak dapat sejajar dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta). Kebijakan yang terkenal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan KUD adalah Instruksi Presiden No. 4/1984 yang merupakan pengganti Inpres No. 2/1978. Beberapa isi dari Inpres No. 4/1984 adalah ; (a) Membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya dan menyediakan bantuan fasilitas permodalan serta sarana yang memadai, yang mengutamakan peningkatan dan pelayanan bagi anggota KUD dan masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. (b) Menyediakan kepastian usaha dalam bentuk jaminan pasar dan harga untuk meningkatkan daya saing barang maupun jasa yang dihasilkan para anggota koperasi (KUD) dan masyarakat desa. (c) Menumbuhkan kekuatan dan kemampuan KUD dalam bi-

dang permodalan melalui peningkatan tabungan dan simpanan yang terpusat dan terpadu. (d) Peningkatan pembinaan organisasi, manajemen dan kemampuan pengendalian serta pengawasan interen dan eksteren KUD melalui kegiatan pendidikan, penyuluhan, latihan dan berbagai penataran bagi para pengurus, badan pemeriksa, manager dan pelaksana usaha. (e) Pemantapan dan peningkatan kerjasama dalam keseluruhan jalinan kelembagaan KUD secara terpadu serta terkait dalam kegiatan ekonomi nasional, khususnya di pedesaan.

Realisasi penerimaan pinjaman oleh koperasi pada tahun pertama Pelita III sebesar Rp 103,8 milyar (1979) kemudian naik menjadi Rp 371 milyar (1980) dan pada tahun 1981 posisi ini menunjukkan peningkatan yang sangat menyolok, karena pada tahun tersebut koperasi (khususnya KUD) secara meluas diberi kesempatan mengikuti berbagai program dari pengadaan pangan, Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), pengadaan cengkeh, penyaluran pupuk, sampai ke perikanan sehingga lonjakan tersebut tidak mengherankan. Kesemuanya ini memperlihatkan bahwa dari segi mikro koperasi-koperasi itu memperlihatkan perkembangan yang mantap, baik karena faktor internal maupun lingkungan usaha koperasi. Jadi jelas bahwa perkembangan modal pinjaman koperasi sangat tergantung dari kebijaksanaan pemerintah.

Selanjutnya pada tahun pertama Pelita IV terjadi lagi penurunan pada pinjaman koperasi, yaitu pada tabel 4.1

terlihat bahwa realisasi modal pinjaman pada koperasi hanya berkisar Rp 237 milyar (1983) turun menjadi Rp 219 milyar (1984). Penurunan ini karena pada tahun 1983 pemerintah mengadakan suatu kebijaksanaan di bidang perbankan yaitu deregulasi perbankan 1983. Namun karena kemampuan koperasi untuk mengimbangi kebijaksanaan yang ada maka pada tahun 1985 modal koperasi yang bersumber dari pinjaman mulai memperlihatkan peningkatan yang cukup baik, yaitu mencapai realisasi yang besar atau sekitar Rp 1,513 trilyun, yaitu naik sebesar Rp 1,294 trilyun.

4.1.2. Volume Usaha Koperasi

Volume Usaha merupakan salah satu alat ukur terhadap keberhasilan suatu koperasi (selain jumlah koperasi, jumlah anggota, permodalan dan Sisa Hasil Usaha). Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa volume usaha koperasi pada Pelita I masih relatif kecil, pada tahun pertama Pelita I (1969) realisasi volume usaha koperasi sebesar Rp 337,4 milyar kemudian berturut-turut naik menjadi Rp 538,8 milyar (1970), kemudian turun selama dua tahun berturut-turut yaitu Rp 318 milyar (1971) dan Rp 253,5 milyar (1972). Realisasi besarnya volume usaha selama Pelita I menunjukkan angka tertinggi pada tahun 1970 yaitu sebesar Rp 538,8 milyar. Sedang untuk pertumbuhan pertahun selama Pelita I itu hanya berkisar 0,18 persen pertahun, suatu pertumbuhan yang cukup memprihatinkan. Namun keadaan ini tidak bertahan lama karena pada tahun kedua Pelita II (1975) keadaan volume

usaha kembali memperlihatkan keadaan yang menggembirakan. Realisasi pada tahun 1975 sebesar Rp 367,9 milyar atau meningkat sekitar 38,9 persen dari Rp 264,8 milyar. Keadaan ini terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Selama Pelita II terdapat pertumbuhan volume usaha sekitar 37 persen pertahun dan realisasi volume usaha koperasi tertinggi selama Pelita II ini terjadi pada tahun 1977 yaitu sebesar Rp 1,09 trilyun. Kemudian kembali turun selama dua tahun berturut-turut, namun masih meningkat bila dibanding dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya (kecuali tahun 1977). Dan memasuki tahun kedua sampai tahun kelima Pelita III realisasi volume usaha koperasi kembali memperlihatkan keadaan yang menggembirakan yaitu sebesar Rp 2,2 trilyun (1980), Rp 2,06 trilyun (1981), Rp 2,4 trilyun (1982) dan Rp 2,119 trilyun pada tahun 1983.

Pada tabel 4.2 juga dapat dilihat bahwa setelah memasuki tahun 1984 yaitu tahun pertama Pelita IV realisasi volume usaha koperasi sedikit mengalami penurunan yaitu sekitar Rp 629 milyar dari Rp 2,119 trilyun (1983) turun menjadi Rp 1,490 trilyun (1984). Penurunan ini terjadi akibat adanya deregulasi perbankan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Tahun kedua Pelita IV (1985) volume usaha kembali naik sampai sekitar Rp 723,6 milyar dari Rp 1,490 trilyun (1984) naik menjadi Rp 2,214 trilyun (1985). Kenaikan ini membuktikan bahwa koperasi mulai menyesuaikan diri dengan kebijakan

sanaan baru. Antara lain dengan dibangunnya kembali Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOFIN). Namun pada tahun 1986 volume usaha koperasi kembali menurun sekitar 34 persen dari keadaan sebelumnya, atau dengan kata lain volume usaha turun sebesar Rp 760,7 milyar menjadi Rp 1,453 trilyun (1986), hal ini seiring dengan turunnya laju sektor pertanian waktu itu. Tetapi sesudah itu volume usaha koperasi dapat dipertahankan pada tingkat tahun 1983, sehingga volume usaha tahun 1987 adalah Rp 2,7 trilyun, pada tahun 1988 (Rp 3,7 trilyun) bahkan pada dua tahun kemudian berturut-turut Rp 4,3 trilyun (1989) dan Rp 4,6 trilyun pada akhir observasi (1990).

Peningkatan volume usaha koperasi ini di satu pihak berkat kemampuan koperasi untuk menyesuaikan diri pada kebijaksanaan ekonomi selama Pelita IV, sehingga walaupun mengalami gejolak ekonomi yang tajam namun dapat mempertahankan volume usaha koperasi yang tinggi pada akhir Pelita IV, bahkan memasuki Pelita V volume usaha akan terus meningkat.

Meningkatnya volume usaha tersebut karena koperasi punya daya penyesuaian diri yang tinggi. Dan tahun 1989 terdapat pula rencana penyaluran pupuk untuk produksi pangan yang akan ditingkatkan dari 75 persen yang sudah dicapai menjadi 100 persen oleh KUD mulai 1 April 1989.

Terjadinya peningkatan volume usaha koperasi juga disebabkan karena peningkatan mutu KUD dengan pertumbuhan

KUD mandiri, begitu pula karena kegiatan koperasi non-KUD meningkat jumlahnya.

4.1.3. Sisa Hasil Usaha

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tidaknya suatu usaha adalah besarnya hasil atau profit yang didapatkan dari usaha yang sedang dijalankan. Hal ini berlaku bagi usaha-usaha yang menganut profit oriented. Namun bagi koperasi, ukuran tentang keberhasilannya dapat ditinjau dari berbagai cara yang mana salah satu di antaranya adalah besarnya sisa hasil usaha (di samping itu juga jumlah koperasi, jumlah anggota, volume usaha dan permodalan).

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi di Indonesia pada awal Pelita I berkisar Rp 2,376 milyar, dan terus menerus meningkat sampai pada tahun kedua Pelita V. Pada tahun kedua Pelita I realisasi SHU sebesar Rp 3,8 milyar atau naik sekitar 59,7 persen dari tahun sebelumnya, kemudian berturut-turut naik menjadi Rp 5,5 milyar (1971), Rp 6 milyar pada tahun 1972, Rp 6,6 milyar (1973) dan rata-rata pertumbuhan selama Pelita I adalah 29 persen.

Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1974 realisasi SHU menunjukkan penurunan, namun tidak begitu besar. Penurunan ini berbarengan dengan penurunan volume usaha pada tahun yang sama, besarnya penurunan pada SHU sekitar 2,8 persen atau turun sebesar Rp 182 juta dari Rp 6,597 milyar (1973) menjadi Rp 6,415 milyar (1974). Keadaan yang sama juga dialami pada modal koperasi baik yang bersumber dari

simpanan maupun yang bersumber dari pinjaman. Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan SHU terus memperlihatkan keadaan yang cukup menggembirakan, kecuali yang terjadi pada tiga tahun berturut-turut dalam Pelita III (1981, 1982, dan 1983) di mana terjadi penurunan bila dibanding keadaan tahun sebelumnya. Pada tahun 1975 SHU mengalami peningkatan sekitar 40 persen dari tahun sebelumnya, lalu naik lagi sekitar 35 persen (1976), 22 persen (1977), dan 15 persen (1978) atau dengan kata lain bahwa rata-rata pertumbuhan pertahun yang dialami SHU selama Pelita II adalah sekitar 21,6 persen pertahun. Namun bila kita bandingkan antara keadaan SHU pada tahun pertama dengan tahun kelima Pelita II maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan SHU pada tahun kelima Pelita II (1978) sebesar 166 persen yaitu naik dari Rp 6,415 milyar (1974) menjadi Rp 17,070 milyar (1978) atau dengan kata lain bahwa SHU telah mengalami kenaikan sebesar Rp 10,66 milyar pada tahun kelima Pelita II (1978) bila dibanding dengan keadaan tahun pertama pelita yang sama (1974), lihat tabel 4.2.

Memasuki Pelita III keadaan SHU sedikit mengalami pertumbuhan yang lamban bila dibanding dengan pertumbuhan yang dialami pelita-pelita sebelumnya, kecuali pertumbuhan dari tahun pertamake tahun kedua Pelita III yaitu pertumbuhan mencapai +5 persen bila dibanding dengan keadaan tahun pertama. Atau dengan kata lain bahwa pada tahun kedua Pelita III (1980) SHU bertambah sebesar Rp 7,87 milyar dari Rp 17,3 milyar (1979) naik menjadi Rp 25,2 milyar (1980).

Namun pada tahun-tahun berikutnya bukan lagi pertumbuhan yang terjadi, melainkan penurunan SHU. Hal ini terjadi sampai tahun terakhir Pelita III (1983).

Pada tabel 4.2 juga dapat dilihat bahwa setelah memasuki tahun pertama Pelita IV, keadaan SHU kembali membaik bahkan pada tahun-tahun berikutnya selama pelita yang sama realisasi SHU memperlihatkan keadaan yang meningkat. Pada tahun 1985 atau tahun kedua Pelita IV SHU telah mengalami pertumbuhan sekitar 25 persen dari tahun sebelumnya atau meningkat dari Rp 25,9 milyar (1984) naik menjadi Rp 32,41 milyar (1985) atau naik sebesar Rp 6,55 milyar. Bahkan pada tahun 1987 terjadi pertumbuhan SHU yang sangat besar dibanding pertumbuhan pada tahun-tahun lain selama Pelita IV, pertumbuhan itu sampai mencapai sekitar 91 persen atau sebesar Rp 36 milyar dari Rp 39,4 milyar (1985) naik menjadi Rp 75,5 milyar (1986). Sisa Hasil Usaha koperasi yang terbesar pada Pelita IV dicapai pada tahun 1988 yaitu mencapai Rp 109,7 milyar.

4.1.4. Pertumbuhan Koperasi Ditinjau dari Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggota Koperasi

Cara lain sebagai indikator untuk melihat atau menilai perkembangan koperasi adalah jumlah koperasi dan jumlah anggota koperasi. Indikator ini termasuk indikator secara makro yang bersifat fisik kuantitatif. Untuk melihat perkembangan secara makro tersebut sudah sering diungkapkan data perkembangan dalam berbagai tulisan. Meskipun de-

mikian berikut ini disajikan data tersebut, hanya dengan suatu cara penyajian yang agak berbeda dari biasanya di mana besaran-besaran yang menyangkut satuan moneter yang dideflasikan. Hal ini penting karena ia selama ini jarang diungkapkan, pada hal yang ingin kita lihat adalah suatu perkembangan riil bukan nominalnya saja.

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah koperasi yang sebenarnya lebih merupakan faktor eksogen (di mana sangat tergantung pada pilihan kebijaksanaan pemerintah), memiliki perkembangan yang mengikuti periode kebijaksanaan itu sendiri. Hal itu ternyata sekali dalam perkembangan selama periode 1973 - 1977, di mana kebijaksanaan dan pengembangan koperasi di pedesaan ditempuh melalui suatu organisasi pra-koperasi. Dalam proses peralihan ini masih sering terlihat adanya beberapa lembaga koperasi di dalam suatu wilayah pedesaan. Namun demikian, dengan berbagai upaya pemerintah maka pada akhirnya jumlah koperasi sudah mulai bisa ditertibkan dan terlihat mulai ada pada perkembangan yang terarah.

Di bidang keanggotaan terlihat pola yang lebih pasti, di mana perkembangannya memperlihatkan kecenderungan perkembangan jumlah anggota koperasi yang terus meningkat secara pasti. Kemajuan perkembangan anggota koperasi patut dicatat, mengingat laju pertumbuhan pertahun selama tahun 1969 - 1989 mencapai sekitar 11,8 persen, hal ini karena jumlah anggota koperasi tidak cenderung dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah seperti halnya dengan jumlah koperasi.

Perkembangan koperasi menurut perkembangan jumlah koperasi selama Pelita I memperlihatkan keadaan yang terus meningkat. Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pada Pelita I perkembangan koperasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pertahun selama Pelita I berkisar 8,3 persen. Kemudian memasuki tahun pertama Pelita II jumlah koperasi meningkat sekitar 67,75 persen dari 19.195 unit (1973) menjadi 32.200 unit (1974) atau naik sebesar 13.005 unit, namun dalam tahun-tahun berikutnya selama Pelita II pertumbuhan berfluktuasi pada jumlah koperasi yang ada. Dan nanti memasuki Pelita III dan seterusnya pertumbuhan koperasi ditinjau dari jumlah koperasi kembali memperlihatkan keadaan yang stabil. Perkembangan koperasi selama Pelita IV, bila dilihat dari perkembangan jumlah koperasi cukup baik, bahkan sampai tahun kedua Pelita V (1990). Artinya, perkembangan jumlah koperasi nampak terus meningkat sejak Pelita III dan tidak terpengaruh oleh perkembangan ekonomi umum pada Pelita IV yang mengalami banyak guncangan.

Walaupun jumlah koperasi terus meningkat sejak Pelita III hingga sekarang, namun dapat dicatat bahwa angka jumlah seluruh koperasi tahun 1988 sebanyak 32.990 unit adalah di bawah angka proyeksi yang pernah dibuat, yaitu 36.800 unit untuk seluruh koperasi.²¹ Bahkan angka ini

²¹ Wahyu Sukotjo, Proyeksi Perkembangan Jumlah Koperasi Thn. 1982-1987 (naskah), Departemen Koperasi, 1987.

belum tercapai sampai pada akhir observasi (1990), di mana pada tahun 1990 jumlah koperasi baru mencapai 36.466 unit (tabel 4.3). Hal ini menandakan bahwa telah terjadi perlambatan pada pertumbuhan seluruh jumlah koperasi, namun demikian laju pertumbuhan jumlah koperasi masih dinilai normal.

Dari segi keanggotaan, jumlah anggota koperasi terus mengalami peningkatan dari tahun pertama Pelita I sampai tahun terakhir Pelita IV, kecuali pada Pelita V keadaannya menunjukkan penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel terlampir (tabel 4.3) di mana pada tahun pertama dan kedua Pelita V terjadi penurunan jumlah anggota koperasi dari 26,363 juta orang (1988) menjadi 25,260 juta orang (1989) atau sekitar 4,2 persen. Kemudian pada tahun 1990 malah lebih tajam lagi penurunannya yaitu sekitar 27,7 persen dari 25,260 juta orang (1989) menjadi 18,255 orang (1990).

Keanggotaan koperasi mempunyai kedudukan penting dan kedudukan sentral dalam perkumpulan koperasi. Hal ini karena tolok ukur keberhasilan koperasi yang penting adalah harus adanya "dampak koperasi" atau cooperative effect, yaitu dampak koperasi yang dirasakan oleh para anggota dan masyarakat lingkungannya. Artinya bahwa koperasi harus berguna bagi anggotanya.

Dengan anggapan bahwa koperasi pada dasarnya bersifat "terbuka", atau setidaknya bersifat "tidak eksklusif" maka besarnya jumlah anggota koperasi bisa menjadi petun-

duk kegunaan koperasi. Dengan demikian semakin besar jumlah anggota koperasi (dan semakin cepat pertambahan jumlah anggota koperasi) semakin besar pula dampak (manfaat) koperasinya.

Dapat dicatat bahwa di dalam program pembinaan dan pengembangan KUD mandiri oleh pemerintah dalam Pelita V, direncanakan agar KUD mandiri dapat mempunyai anggota penuh minimal 25 persen dari jumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan KUD di daerah koperasi.

Berdasarkan pernyataan di atas maka untuk membuat perbandingan dengan negara lain maka jumlah anggota koperasi tersebut tadi (dalam persentase), tidak dibandingkan dengan jumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan koperasi di daerah kerjanya, tetapi dibandingkan dengan jumlah penduduk sebagai berikut ; apabila untuk "jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan keanggotaan koperasi", seperti yang dimaksud di atas, kita ambil (kita samakan) kelompok penduduk berumur antara 15 - 64 tahun, maka untuk tahun 1990 angka kelompok penduduk tersebut adalah 58,9 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4 terlampir.

Dengan demikian jumlah anggota koperasi yang diharapkan sebesar 25 persen dari jumlah penduduk dewasa tersebut sama dengan $25 \text{ persen} \times 58,9 \text{ persen} = 14,7 \text{ persen}$ dari jumlah seluruh penduduk. Hal ini dapat diartikan bahwa "sasaran" jumlah anggota penuh koperasi dalam Pelita V ialah 14,7 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.

4.2. Pengujian Empiris

Dalam pengujian empiris kali ini, penulis mencoba untuk melihat hubungan antara modal usaha sebagai variabel bebas (independen) terhadap volume usaha sebagai variabel terikat (dependen) dalam regresi I. Dalam hal ini modal yang dimaksud terdiri dari modal sendiri (bersumber dari simpanan anggota) dan modal pinjaman (pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan).

Selain itu, penulis juga akan melihat hubungan antara volume usaha sebagai variabel independen terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai variabel dependen. Dan pengujian terakhir adalah bertujuan untuk melihat pengaruh modal koperasi (simpanan dan pinjaman) sebagai variabel independen terhadap Sisa Hasil Usaha sebagai variabel dependen.

Dalam regresi I yaitu antara modal pinjaman (X_1) dan modal simpanan (X_2) terhadap volume usaha (Y) memperlihatkan hasil perhitungan komputer sebagai berikut :

$$\ln(Y) = 3,6132 + 0,2771 \ln(X_1) + 0,5955 \ln(X_2)$$

Se	(0,1548)	(0,1878)
t _{hit.}	(1,790)	(3,171)
R ² = 0,8357	DF. = 19	DW = 0,9102
N = 22	F _{hit.} = 48,323	

di mana :

Y = Volume Usaha Koperasi
 X_1 = Pinjaman

X_2 = Simpanan

Se = Standard Error

$t_{hit.}$ = Uji statistik-t (t-hitung)

$F_{hit.}$ = Uji statistik-F (F-hitung)

R^2 = Koefisien determinasi

Df = Derajat bebas (degree of freedom)

DW = Durban Watson Test

N = Jumlah observasi

Dari hasil regresi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tingkat kesempurnaan garis regresi cukup baik, hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2) yang cukup tinggi (0,8357) atau dengan kata lain bahwa presisi garis regresi adalah sangat tinggi atau sekitar 83,57 persen dari tingkat kesempurnaannya. Demikian pula dengan koefisien regresi ganda (multiple R) yang berkisar 0,9142, ini berarti bahwa hubungan antara volume usaha (Y) sebagai variabel dependen dengan variabel-variabel independen pinjaman (X_1) dan simpanan (X_2) sangat erat sekali, yaitu sekitar 91,42 persen dari data menjelaskan bahwa apabila variabel independen X_1 dan X_2 berubah maka variabel dependen Y juga berubah. Jadi hanya sekitar 8,58 persen pengaruh dari faktor-faktor lain selain variabel-variabel yang telah ditetapkan di atas.

Selanjutnya pada pengujian terhadap signifikansi antara variabel independen dengan variabel dependen secara sendiri-sendiri (uji statistik-t) memperlihatkan bahwa

pada tingkat 95 % Confidence Level ($\alpha = 5\%$) dengan degree of freedom 19 uji dua arah diperoleh :

$$t_{\alpha/2}(DF) \text{ atau } t_{0,05/2}(19) = t_{0,025}(19) = 2,093$$

Nilai t hitung untuk pinjaman (X_1) adalah 1,790 yang lebih kecil dari nilai $t_{tab.} = 2,093$, yang berarti bahwa pada tingkat $\alpha = 5\%$ dan degree of freedom 19 ternyata pinjaman (X_1) kurang signifikan terhadap volume usaha (Y). Namun kalau kita menggunakan uji satu arah (one tailed test) dengan $\alpha = 5\%$ dan $DF = 19$ diperoleh nilai tabel sebesar 1,729 ($t_{0,05}(19) = 1,729$). Karena :

$t_{hit.} = 1,790 > t_{0,05}(19) = 1,729$ maka pinjaman (X_1) signifikan terhadap volume usaha.

Kemudian $t_{hit.}$ untuk simpanan (X_2) sebesar 3,171 lebih besar dari $t_{tab.}$ atau dengan kata lain bahwa untuk simpanan (X_2) :

$t_{hit.} = 3,171 > t_{0,025}(19) = 2,093$ sehingga dapat disimpulkan bahwa simpanan (X_2) ternyata signifikan pada tingkat 95 % Confidence Level atau $\alpha = 5\%$ dan $DF = 19$.

Untuk mengadakan pengujian terhadap signifikansi antar variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen maka digunakan uji statistik-F. Dari hasil perhitungan komputer diperoleh nilai $F_{hit.}$ sebesar 48,323 sedang $F(DF); \alpha$ atau $F_{v_1, v_2; \alpha} = F_{2, 19; 5\%} = 3,52$

di mana :

$$v_1 = k = \text{jumlah variabel independen} = 2$$

$$v_2 = N - k - 1 = 22 - 2 - 1 = 19$$

$$\alpha = 5\%$$

Jadi $F_{hit.} = 48,323 > F_{2, 19; 5\%} = 3,52$ yang berarti bahwa pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen adalah sangat berarti (sangat signifikan). Hal ini tercermin pula pada koefisien determinasi yang telah dikemukakan di atas, yaitu sebesar 0,8357 yang berarti bahwa sekitar 83,57 % dari fluktuasi volume usaha (Y) ditentukan oleh besaran-besaran bebasnya.

Kemudian apabila kita perhatikan tanda-tanda aljabar pada koefisien-koefisien yang muncul adalah sesuai dengan yang diinginkan (konsisten), yaitu pinjaman muncul dengan tanda positif dan simpanan juga dengan tanda positif. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai numerik dari koefisien-koefisien, dan dengan mengingat bahwa dalam sebuah persamaan logaritma nilai-nilai tersebut merupakan ramalan elastisitas, maka dapat dikatakan bahwa elastisitas volume usaha koperasi dalam hubungannya dengan modal pinjaman (X_1) sebesar 0,2771. Hal ini berarti bahwa bila modal pinjaman naik 1 % (satis paribus), maka volume usaha akan naik sebesar 0,2771 %. Di lain pihak, elastisitas volume usaha dalam hubungannya dengan modal simpanan (X_2) sebesar 0,5955 yang berarti bahwa apabila modal simpanan (X_2) sebesar 1 % (satis paribus) maka volume usaha koperasi akan naik sebesar 0,5955 % atau dengan kata lain bahwa apabila modal simpanan naik sebesar 10 % maka volume usaha akan naik sebesar 5,955 %.

Apabila kita bandingkan antara elastisitas modal pinjaman (X_1) dengan elastisitas modal simpanan (X_2) terhadap volume usaha selama masa observasi (1969 - 1990) maka terlihat bahwa elastisitas dari modal koperasi yang bersumber dari simpanan ternyata lebih besar daripada elastisitas modal yang bersumber dari pinjaman (X_2). Hal ini dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa peranan pinjaman sekama ini belum begitu berarti dalam upaya peningkatan volume usaha bila dibanding dengan peranan modal simpanan. Pernyataan ini didukung pula oleh uji signifikansi (uji statistik-t) yang memberi gambaran bahwa modal pinjaman tidak signifikan pada taraf 5 % uji dua arah, kecuali pada uji satu arah baru menunjukkan hubungan yang signifikan namun masih tidak terlalu signifikan karena perbedaan antara t hitung dengan t tabel sangat kecil. Kecilnya tingkat keberartian secara statistik dari modal pinjaman ini kemungkinan disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah dalam hal pemberian kredit kepada koperasi. Atau dengan kata lain bahwa besar-kecilnya pinjaman oleh koperasi ditentukan oleh kebijaksanaan pemerintah.

Kembali pada hasil perhitungan komputer, diperoleh Standard Error of Regression (SER) atau Standard Error of Estimate muncul dengan nilai yang kecil yaitu sebesar 0,4281 yang berarti tingkat kesalahan kita dalam memakai model regresi di atas sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,4281. Atau dengan kata lain bahwa model regresi yang kita gunakan di atas sudah tepat, dan dapat dipercaya.

Berikut ini adalah pengujian empiris mengenai hubungan antara volume usaha (Y) sebagai variabel independen terhadap Sisa Hasil Usaha (Z) sebagai variabel dependen. Hal ini diperlihatkan dalam regresi II sbb.:

$$\ln(Z) = -3,7507 + 0,9737 \ln(Y)$$

Se (0,1229)

$t_{hit.}$ (7,920)

$R^2 = 0,7582$ $DF = 20$ $DW = 0,6922$

$N = 22$ $F_{hit.} = 62,730$

di mana :

- Z = Sisa Hasil Usaha
- Y = Volume Usaha
- Se = Standard Error
- $t_{hit.}$ = Uji statistik-t (t hitung)
- $F_{hit.}$ = Uji statistik-F (F hitung)
- R^2 = Koefisien determinasi
- DF = Derajat bebas (Degree of Freedom)
- DW = Durban Watson test
- N = Jumlah observasi

Dari hasil regresi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kesempurnaan garis regresi cukup baik yang dibuktikan dengan koefisien determinasi (R^2) sekitar 0,7582 dan dengan kata lain bahwa presisi garis regresi cukup tinggi yaitu 75,82 % dari tingkat kesempurnaannya. Demikian pula dengan koefisien korelasi (R) yang berkisar 0,8708 yang berarti bahwa hubungan antara SHU (Z) sebagai variabel dependen

dengan volume usaha (Y) sebagai variabel independen cukup erat, yaitu sekitar 87,08 % dari data menjelaskan bahwa apabila variabel independen (Y) berubah maka variabel dependen (Z) juga berubah. Jadi hanya sekitar 12,92 % pengaruh dari faktor-faktor lain selain variabel di atas.

Pada uji signifikansi antara variabel independen terhadap variabel dependen, terlihat bahwa pada tingkat 95 % Confidence Level ($\alpha = 5\%$) dan derajat bebas (degree of freedom) sebesar 20, maka terbukti bahwa volume usaha mempunyai hubungan yang signifikan terhadap SHU, karena :

$$t_{\text{hit.}} = 62,730 > t_{\alpha/2, DF} = 2,086$$

Dari tanda-tanda aljabar yang muncul pada regresi tersebut di atas, ternyata konsisten yaitu antara volume usaha (Y) dan SHU (Z) mempunyai hubungan yang positif. Selain itu dapat pula disimpulkan bahwa karena nilai parameter pada $\ln(Y)$ merupakan elastisitas maka elastisitas SHU (Z) dalam hubungannya dengan volume usaha (Y) sebesar 0,9737 yang berarti bahwa apabila volume usaha (Y) naik sebesar 10 % (satis paribus) maka SHU (Z) akan naik sebesar 9,373 %.

Hal lain yang dapat disimpulkan dari hasil regresi II yaitu Standard Error of Regression (SER) sebesar 0,5355 yang berarti tingkat kesalahan dalam penggunaan model regresi tersebut sangat kecil.

Pengujian empiris yang terakhir yaitu untuk melihat

hubungan antara modal koperasi yang bersumber dari pinjaman (X_1) dan simpanan (X_2) terhadap SHU (Z). Hal ini digambarkan oleh regresi III berikut ini :

$$\ln(Z) = -1,8968 + 0,0870 \ln(X_1) + 0,9225 \ln(X_2)$$

Se.	(0,1078)	(0,1287)
$t_{hit.}$	(0,807)	(7,165)
$R^2 = 0,9277$	DF = 19	DW = 1,3398
N = 22	$F_{hit.} = 121,822$	

Pertama-tama dapat kita simpulkan bahwa dengan koefisien determinasi (R^2) yang sangat tinggi yaitu sekitar 0,9277 membuktikan bahwa presisi garis regresi sangat tinggi yaitu sekitar 92,77 % dari tingkat kesempurnaan. Dengan demikian koefisien korelasi ganda (multiple R) yang menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen muncul dengan nilai yang sangat tinggi yaitu sekitar 0,9632 yang berarti hubungan antara modal pinjaman (X_1) dan modal simpanan (X_2) terhadap SHU (Z) sangat erat sekali. Atau dengan kata lain bahwa sekitar 96,32 % dari naik turunnya SHU dipengaruhi oleh naik turunnya modal pinjaman (X_1) maupun modal simpanan (X_2). Jadi hanya sekitar 3,68 % dari perubahan SHU (Z) dipengaruhi oleh faktor lain.

Kemudian bila kita perhatikan nilai $t_{hit.}$ yang muncul, maka dapat kita menentukan signifikansi antara variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel

dependen. Apabila kita menggunakan tingkat 95 % Confidence Level ($\alpha = 5\%$) dan derajat bebas (DF) 19 uji dua arah maka diperoleh nilai tabel :

$$t_{\alpha/2, DF} = t_{0,025; 19} = 2,093$$

Nilai t-hitung untuk modal pinjaman (X_1) sebesar 0,807 ternyata lebih kecil dari nilai t-tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal pinjaman (X_1) tidak signifikan pada tingkat 95 % Confidence Level dan DF 19 terhadap SHU (Z) selama masa observasi (1969 -1990).

Sedang untuk modal simpanan (X_2) :

$t_{hit.} = 3,171 > t_{0,025; 19} = 2,093$ berarti modal simpanan (X_2) signifikan dengan SHU (Z). Atau dengan kata lain bahwa modal simpanan (X_2) mempunyai keberartian secara statistik.

Hal ini sesuai dengan kesimpulan pada regresi I di manamodal simpanan juga signifikan dalam hubungannya dengan volume usaha. Jadi modal simpanan ternyata mempunyai keberartian secara statistik, baik dalam hubungannya dengan volume usaha (Y) maupun dalam hubungannya dengan SHU (Z). Lain halnya dengan modal pinjaman (X_1) yang ternyata tidak signifikan, baik dalam hubungannya dengan volume usaha (Y) maupun dalam hubungannya dengan SHU (Z). Hal ini bila kita gunakan uji statistik-t dengan metode dua arah atau two tailed test, Namun bila kita gunakan uji statistik-t uji satu arah (one tailed test) maka pada regresi I, yaitu untuk melihat hubungan antara pinjaman (X_1) dan simpanan

atau X_2 terhadap volume usaha (Y) ternyata pinjaman signifikan dalam hubungannya dengan volume usaha, namun tingkat signifikannya rendah. sedang pada regresi III yaitu untuk melihat hubungan antara modal pinjaman (X_1) dan modal simpanan (X_2), uji statistik-t dua arah ataupun satu arah tetap tidak memperlihatkan signifikansi antara pinjaman (X_1) terhadap SHU (Z), kecuali modal simpanan yang tetap signifikan dalam hubungannya dengan volume usaha maupun terhadap SHU, uji statistik-t, dua arah atau satu arah.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa selama masa observasi (1969 - 1990) ternyata besar kecilnya pinjaman oleh sektor koperasi sangat dipengaruhi oleh ketat atau longgarnya kebijaksanaan pemerintah mengenai pemberian kredit kepada koperasi tersebut. Karena lemahnya peranan modal pinjaman dalam menunjang perkembangan koperasi selama ini maka sangat diharapkan agar kebijaksanaan pemberian kredit kepada koperasi lebih mengarah kepada pemberian kemudahan kepada sektor koperasi dalam hal perolehan kredit, hal ini diupayakan agar di masa-masa mendatang peranan modal pinjaman bisa lebih nyata dalam menunjang pembangunan koperasi.

B A B . V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Modal koperasi yang bersumber dari pinjaman dan simpanan mempunyai hubungan yang positif, baik terhadap volume usaha maupun terhadap SHU.
2. Dalam persamaan regresi untuk melihat hubungan antara modal pinjaman dan simpanan terhadap volume usaha :
$$\ln (Y) = 3,6132 + 0,2771 \ln (X_1) + 0,5955 \ln (X_2)$$
membuktikan bahwa jika pinjaman mengalami kenaikan sebesar 10 % (satis paribus) maka volume usaha akan naik sebesar 2,771 %. Dan setiap kenaikan simpanan sebesar 10 % (satis paribus), akan menaikkan volume usaha sebesar 5,955 %.
3. Pada pengujian statistik-t terlihat bahwa pada taraf $\alpha = 5\%$ dan degree of freedom 19 uji dwi arah ternyata modal simpanan punya keberartian secara statistik terhadap volume usaha, sedang modal pinjaman tidak signifikan.
4. Pada pengujian empiris untuk melihat pengaruh volume usaha terhadap SHU, diperoleh :
$$\ln (Z) = - 3,7307 + 0,9737 \ln (Y)$$
yang berarti bahwa apabila volume usaha naik sebesar 10 persen maka SHU akan naik sebesar 9,373 %.
5. Dari pengujian untuk melihat hubungan antara modal pinjaman serta simpanan terhadap SHU maka diperoleh :

$\ln (Z) = - 1,8969 + 0,087 \ln (X_1) + 0,9225 \ln (X_2)$
 berarti bahwa apabila modal pinjaman naik sebesar 10 persen (satis paribus) maka SHU akan meningkat sebesar 0,87 %. Dan kalau diasumsikan modal pinjaman sama dengan nol maka setiap kenaikan pada modal pinjaman sebesar 10 % akan mengakibatkan kenaikan pada SHU sebesar 9,225 %.

5.2. Saran

1. Karena mobilisasi modal yang berasal dari simpanan sangat signifikan terhadap peningkatan volume usaha maupun SHU maka diharapkan kiranya para anggota koperasi sadar tentang pentingnya peranan modal simpanan dalam pengembangan usaha koperasi.
2. Karena selama masa observasi besarnya modal kredit yang diperoleh koperasi masih berfluktuasi sesuai dengan otoritas pemerintah maka diharapkan kiranya ada kelengkapan kebijaksanaan agar koperasi dapat lebih mudah memperoleh kredit untuk pengembangan usahanya.

REGRESSION ANALYSIS I
 NUMBER OF CASES: 22 LABEL: DATA1
 NUMBER OF VARIABLES: 3

ANSAR

INDEX	NAME	MEAN	STD. DEV.
1	LNK1	12.1855	1.2326
2	LNK2	11.5686	1.0162
3	LNK3	13.8795	1.0046

DEPENDENT VARIABLE: LNY1

REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 19)	PROB.	PARTIAL r ²
1 .2771	.1548	1.790	.08945	.1443
2 .5955	.1878	3.171	.00503	.3461
CONSTANT 3.6132				

STANDARD ERROR OF EST. = .4281
 ADJUSTED R SQUARED = .8184
 R SQUARED = .8357
 MULTIPLE R = .9142

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	17.7122	2	8.8561	48.323	3.535E-08
RESIDUAL	3.4821	19	.1833		
TOTAL	21.1943	21			

OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL	STANDARDIZED RESIDUALS
1 12.640	12.125	.5150	*
2 12.790	12.648	.1422	*
3 12.670	13.084	-.4137	*
4 12.440	13.158	-.7177	*
5 12.740	13.109	-.3694	*
6 12.490	12.942	-.4516	*
7 12.820	13.213	-.3934	*
8 12.980	13.419	-.4395	*
9 13.900	13.699	.2006	*
0 13.750	13.427	.3234	*
1 13.800	13.442	.3578	*
2 14.610	14.029	.5808	*
3 14.340	14.468	-.1278	*
4 14.690	13.882	.8083	*
5 14.570	14.018	.5524	*
6 14.210	14.204	.0061	*
7 14.610	14.757	-.1466	*
8 14.610	14.757	-.4451	*
9 14.790	15.235	-.0941	*
0 14.800	14.894	.0922	*
1 15.110	15.018	.0081	*
2 15.260	15.252	.0123	*
3 15.340	15.328		

BIN-WATSON TEST = .9102

REGRESSION ANALYSIS II
 HEADER DATA FOR: M:DATA3
 NUMBER OF CASES: 22 LABEL: REGRES1
 NUMBER OF VARIABLES: 2

ANSAR

INDEX	NAME	MEAN	STDEV.
1	LNZ	13.8777	1.7677
2	LNZ	9.8009	1.7677

DEPENDENT VARIABLE: LNZ

VAR.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T (DF = 20)	PROB.
LNZ	.9737	.1229	7.920	.0000
CONSTANT	-3.7307			

STD. ERROR OF EST. = .5355

r SQUARED = .7582
 r = .8708

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F Ratio	Prob.
REGRESSION	17.9887	1	17.9887	62.736	1.30E-07
RESIDUAL	5.7353	20	.2868		
TOTAL	23.7240	21			

	OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL	STANDARDIZED RESIDUALS
1	7.770	9.550	-1.7800	
2	8.280	8.722	-.4424	*
3	8.620	8.606	.0145	
4	8.700	8.382	.3184	
5	8.790	8.674	.1163	
6	8.770	8.430	.3397	
7	9.100	8.752	.3484	
8	9.410	8.907	.5026	
9	9.600	9.803	-.2031	
10	9.750	9.657	.0929	
11	9.760	9.706	.0542	
12	10.130	10.494	-.3644	*
13	10.090	10.232	-.1415	
14	10.050	10.572	-.5223	*
15	10.000	10.455	-.4555	*
16	10.160	10.105	.0550	
17	10.390	10.494	-.1044	
18	10.580	10.085	.4945	
19	11.230	10.679	.5506	
20	11.610	10.981	.6288	
21	11.370	11.127	.2427	
22	11.460	11.205	.2548	

MURBIN-WATSON TEST = .6722

ANSAR

INDEX	NAME	MEAN	STD. DEV.
1	LNK1	12.1855	1.1336
2	LNK2	11.5432	1.0324
DEP. VAR.:	LNZ	9.8127	1.9865

DEPENDENT VARIABLE: LNZ

VAR.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 19)	PROB.	PROB.1
LNK1	.0870	.1076	.807	.4250	
LNK2	.9225	.1287	7.165	.0000	
CONSTANT	-1.8968				

STD. ERROR OF EST. = .3072

ADJUSTED R SQUARED = .9200
 R SQUARED = .9277
 MULTIPLE R = .9632

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	22.9982	2	11.4991	121.812	<.001
RESIDUAL	1.7935	19	.0944		
TOTAL	24.7916	21			

	OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL	STANDARD	RESIDUAL
1	7.770	7.911	-.1408		
2	8.240	8.502	-.2616		
3	8.520	8.999	-.4769		
4	8.700	8.841	-.1413		
5	8.790	8.970	-.1802		
6	8.770	8.792	-.0224		
7	9.100	9.123	-.0279		
8	9.410	9.457	-.0474		
9	9.600	9.195	.4053		
10	9.750	9.290	.4596		
11	9.760	9.376	.3838		
12	10.130	9.847	.2826		
13	10.090	10.147	-.0570		
14	10.090	9.889	.1606		
15	10.000	9.984	.0164		
16	10.160	10.299	-.1395		
17	10.390	10.495	-.1051		
18	10.580	11.271	-.6906		
19	11.530	11.112	.4180		
20	11.610	11.232	.3782		
21	11.370	11.526	-.1559		
22	11.460	11.616	-.1559		

DURBIN-WATSON TEST = 1.3378

TABEL 4
Realisasi Jumlah Koperasi, Anggota, Simpanan, Pinjaman, Volume Usaha, SHU
 Tahun 1969 - 1990
 DI INDONESIA

NO	PELITA	Tahun	A	B	C	D	E	F
1	I	1969	13.949	2.723.065	16.327	19.287	337.366	2.376
2		1970	16.263	2.931.340	29.250	36.714	358.768	3.795
3		1971	16.755	2.750.193	47.345	61.916	318.017	5.529
4		1972	18.054	2.791.076	46.511	83.711	253.526	6.022
5		1973	19.159	2.973.555	45.359	75.403	339.851	6.597
6	II	1974	32.200	4.790.273	39.181	59.474	264.781	6.415
7		1975	23.214	7.446.069	53.633	75.750	367.880	8.990
8		1976	23.214	7.479.000	77.190	73.025	434.770	12.155
9		1977	19.430	7.483.000	52.567	202.500	1.092.104	14.826
10		1978	17.430	7.610.000	61.163	123.940	934.637	17.070
11	III	1979	17.625	7.615.000	67.889	103.814	986.634	17.327
12		1980	19.136	7.980.000	100.565	371.499	2.205.105	25.197
13		1981	21.184	10.059.000	125.609	1.129.572	2.056.067	24.062
14		1982	23.325	11.141.204	113.874	169.735	2.395.056	23.065
15		1983	25.161	12.653.000	122.000	237.090	2.119.434	22.000
16	IV	1984	24.132	13.903.000	172.319	219.245	1.490.112	25.054
17		1985	28.103	20.285.000	178.089	1.513.523	2.213.703	32.408
18		1986	30.446	21.578.000	414.995	1.369.862	1.452.955	39.445
19		1987	30.993	25.538.000	387.945	463.963	2.664.600	75.468
20		1988	32.990	26.363.000	453.374	572.792	3.663.010	109.739
21	V	1989	33.969	25.260.000	583.511	700.047	4.260.190	86.443
22		1990	36.466	20.255.025	641.862	756.051	4.601.005	95.097

KETERANGAN : A = Jumlah Koperasi
 B = Jumlah Anggota
 C = Simpanan (juta rupiah)
 D = Pinjaman (juta rupiah)
 E = Volume Usaha (juta rupiah)
 F = Sisa Hasil Usaha (juta rupiah)

Sumber :
 Prisma, Juli 1986, hal 88 (tahun 1969-1984)
 OPS, hal 550 (tahun 1985-1990)

Perkembangan modal simpanan dan pinjaman kopdrasi
di Indonesia tahun 1969-1990

Tahun	C	D	E	F
1969	16327	-	19287	-
1970	29250	0,79	36714	0,90
1971	47345	0,62	61916	0,69
1972	46511	(0,02)	83711	0,35
1973	45395	(0,02)	75403	(0,10)
1974	39181	(0,14)	59474	(0,21)
1975	53633	0,37	75750	0,27
1976	77190	0,44	73025	(0,03)
1977	52567	(0,32)	202500	1,74
1978	61163	0,16	123940	(0,39)
1979	67089	0,11	103814	(0,16)
1980	100565	0,48	371499	2,58
1981	125609	0,25	1129572	2,04
1982	113874	(0,09)	169735	(0,05)
1983	122000	0,07	237090	0,40
1984	172319	0,41	219245	(0,00)
1985	178009	0,03	1513523	5,90
1986	414995	1,33	1369862	(0,09)
1987	307945	(0,07)	463963	(0,66)
1988	453374	0,17	572792	0,23
1989	583511	0,27	700047	0,22
1990	641862	0,10	756051	0,08

Keterangan :

- C = Modal simpanan (juta rupiah)
- D = Prosentase perkembangan modal simpanan
- E = Modal pinjaman (juta rupiah)
- F = Prosentase perkembangan modal pinjaman

Sumber : Prisma Juli 1986 hal.08 Tahun 1969-1990
Data diolah kembali.
EPS. 1991 hal. 558, data diolah kembali

Tabel 4.2
 Perkembangan volume usaha dan SHU koperasi di Indonesia
 Tahun 1969-1990

Tahun	E	F	G	H
1969	337366	-	-	-
1970	358768	-	2376	-
1971	318017	6,3	3795	59,7
1972	253526	(11,4)	5529	45,7
1973	339852	(20,3)	6022	0,9
1974	264781	34,1	6597	9,5
1975	367880	(22,1)	6415	(2,8)
1976	434770	38,9	8990	40,1
1977	1092104	18,2	12155	35,2
1978	934637	151,2	14026	22,0
1979	986634	(14,4)	17070	15,1
1980	205105	5,6	17327	1,5
1981	2056067	(79,2)	25197	45,4
1982	2395056	702,4	24062	(4,5)
1983	2119434	16,5	23065	(4,1)
1984	1490112	(11,5)	22000	(4,6)
1985	1490112	(29,7)	25854	17,5
1986	2213703	48,6	32400	25,4
1987	1452955	(34,4)	39445	21,7
1988	2664600	83,4	75468	91,3
1989	3663010	37,5	109739	45,4
1989	4260190	16,3	86443	(21,2)
1990	4601005	8,0	75077	10,0

Keterangan :

- E = Volume Usaha (juta rupiah)
 F = Prosentase perkembangan volume usaha (%)
 G = SHU (juta rupiah)
 H = Prosentase perkembangan SHU (%)

Sumber : Prisma Juli 1986 hal. 88 tahun 1969-1984
 data diolah kembali
 DPS hal. 558 tahun 1985-1990
 Data diolah kembali

Tabel 4.3

Perkembangan Jumlah Koperasi dan Jumlah Anggota Koperasi di Indonesia tahun 1969 - 1990

Tahun	C	D	E	F
1969	13.949	-	2.723.065	-
1970	16.263	16,6 %	2.931.340	7,6 %
1971	16.755	3,0 %	2.750.193	- 6,2 %
1972	18.054	77,5 %	2.791.076	1,5 %
1973	19.159	6,1 %	2.973.555	6,5 %
1974	32.200	68,0 %	4.790.273	61,0 %
1975	23.214	- 28,0 %	7.446.069	55,0 %
1976	23.214	0	7.479.000	0,4 %
1977	19.430	- 16,3 %	7.483.000	0,1 %
1978	17.430	- 10,3 %	7.610.000	1,7 %
1979	17.623	1,1 %	7.615.000	0,1 %
1980	19.136	8,6 %	7.980.000	4,8 %
1981	21.184	10,7 %	10.159.000	26,1 %
1982	23.325	10,1 %	11.141.204	10,8 %
1983	25.161	7,9 %	12.653.000	13,6 %
1984	24.132	3,5 %	13.903.000	9,9 %
1985	28.103	16,5 %	20.285.000	45,9 %
1986	30.446	8,3 %	21.578.000	6,4 %
1987	30.993	1,8 %	25.538.000	18,4 %
1988	32.990	6,4 %	26.363.000	3,2 %
1989	33.969	3,0 %	25.260.000	- 4,2 %
1990	36.466	7,4 %	28.255.025	11,9 %

KETERANGAN : C = Jumlah Koperasi (Unit)

D = Prosentase perkembangan jumlah koperasi

E = Jumlah Anggota Koperasi (Orang)

F = Prosentase Perkembangan jumlah Anggota

Sumber :

Prisma, Juli 1986, hal. 88 (data thn. 1969 - 1990)
BPS, 1991, hal. 558, diolah.

Tabel 4.4.
 Komposisi Penduduk Menurut Umur, Tahun 1980-2000
 (dlm Juta Jiwa)

Kelompok Umur	1980		1990		2000	
	Jumlah	(%)	Jumlah	%	Jumlah	(%)
0-14	59.695	40,3	69.097	37,7	76.237	34,2
15-64	83.424	56,4	108.023	58,9	136.941	61,5
Diatas 65	4.917	3,3	6.337	3,4	9.575	4,3

Sumber : BPS, 1986, diolah dalam Djumiati, MS. dkk., "Pola Perumusan Sistem Pendidikan Nasional dalam Menunjang Ketenagakerjaan Indonesia Guna Mensukseskan Pembangunan Nasional". Seminar Nasional Ketenagakerjaan Indonesia, Universitas Merdeka Malang, 1988.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moh. Arsjad dan Sri-Edi Swasono serta Iwan Jaya Azis, Ekonomi Indonesia (Masalah dan Prospek 1989/1990), UI-Press, Jakarta, 1989
- Chaniago, Arifinal, Pendidikan Perkoperasian Indonesia, Angkasa, Bandung, 1986
- Djojohadikusumo, Sumitro Pembangunan Ekonomi, Sinar Harapan, Jakarta, 1985
- Jhingan, M.L., The Economics of Development and Planning, terjemahan oleh D. Guriatno, SH., 16th. ed., New Delhi: Vicas Publishing House Ltd., 1983
- Sagimun, M.D. Koperasi Indonesia, Haji Masagung, Jakarta, 1988
- Mubyarto, Ekonomi Pancasila (Gagasan dan Kemungkinan), LP3ES, Jakarta, 1987
- Raharjo, M. Dawam, Pola Pengembangan Industri Kecil Melalui Koperasi (Ke arah Pemahaman Bangun Usaha Koperasi), Balitbang Depkop, Jakarta, 1985
- Subyakto, Harsono dan Bambang Tri Cahyono, Ekonomi Koperasi, Liberty, Yogyakarta, 1983
- Sudjana, Ibnu, Koperasi Sebagai Alat Kebijakan Pemerintah dan Perkembangannya, LP3ES, Jakarta, 1986
- Sukirno, Sadono, Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Kebijakan, Blma Grafika, Jakarta, 1985
- Supranto, J., Ekonometrika (buku I ed. pertama), LPFE-UI, Jakarta, 1983
- Swasono, Sri-Edi, Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan Indonesia, Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, LPFE-UI, Jakarta, 1988
- Tjiptoadinugroho, R., Perbankan Masalah Perkreditan (Penghayatan, Analisis dan Penuntun), Pradya Paramita, Jakarta, 1990
- Todaro, Michael P., Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Akademika Prassindo, Jakarta, 1985.

Terbitan/Makalah

1. Bank Indonesia, Laporan Mingguan No. 1660, Feb. 1991
2. BPS, Statistik Indonesia, Year Book, berbagai edisi
3. Departemen Koperasi, Undang-undang No. 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Jakarta, 1987
4. Info Bank, Edisi Juli 1991, No. 139
5. Lintang, Tontowi Jauhari, Peranan BPR dalam Pengembangan Koperasi di Indonesia Timur, Makalah, 1992
6. Majalah Bulanan PIP berbagai edisi
7. Makalah-makalah Seminar Nasional Perkoperasian dari berbagai Universitas
8. Prisma, Koperasi Menyongsong Era Swasta, LP3ES, Jakarta, Juli 1986
9. Prospek Demokratisasi (Harapan dan Kenyataan), Kajian masalah-masalah nasional dan internasional, No. 3, vol. 2, 1990
10. Repelita V1989/90 - 1993/94, Buku II
11. Suluh Koperasi, berbagai edisi
12. Inpres No. 4/1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa
13. Surat Kabar Nasional dan Daerah, berbagai edisi.